

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH (BOS) DALAM PELAYANAN PENDIDIKAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG**



TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

S A M S U A R

NIM: 015977579

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2013**

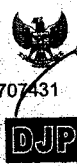
**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Sintang adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Sintang, Desember 2013

Yang Menyatakan



Samsuar
SAMSUAR

NIM. 015977579

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)**

Judul TAPM : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM PELAYANAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG**

Penyusun TAPM : **SAMSUAR**
NIM : **015977579**
Program Studi : **ADMINISTRASI PUBLIK**

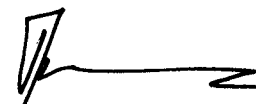
Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Bakran Suni
NIP. 19591212 199902 1 001

Pembimbing II,



Dr. Tita Rosita, M.Pd.
NIP. 19601003 198601 2 001


Mengetahui:

Ketua Bidang Ilmu/Program Magister
Administrasi Publik

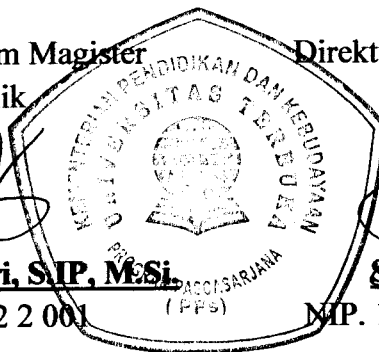


Florentina Ratih Wulandari, S.IP, M.Si.
NIP. 19710609 199802 2 001

Direktur Program Pascasarjana



Suciati, M.S, Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : **Samsuar**
 NIM : **015977579**
 Program Studi : **Administrasi Publik**
 Judul TAPM : **Implementasi Kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Sintang**

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana Program Studi Administrasi Publik Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Rabu/18 Desember 2013
 Waktu : 15.00 – 17.00 Wiba

Dan telah dinyatakan **LULUS**

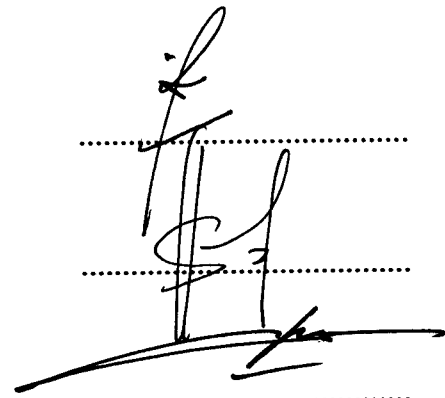
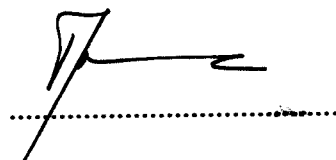
PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji : Dr. Sri Listiyarini, M.Ed.

Penguji Ahli : Dr. Sofyan Arifin, M.Si.

Pembimbing I : Dr. Bakran Suni
 NIP. 19591212 199902 1 001

Pembimbing II : Dr. Tita Rosita, M.Pd.
 NIP. 19601003 198601 2 001

ABSTRACT**Policy Implementation To Aid Operational School (BOS) In Service
Education of Junior High School Country
In Sub-Province Sintang****SAMSUAR****Universitas Terbuka****samsuar@yahoo.com**

The problem in this study is the School Operational Assistance (BOS) in Ministry of Education Junior High School In Sintang. In BOS research is needed to determine how much coverage of BOS funds in order to improve access to education for students / student poor family and can not afford, and how the impact of the implementation of the BOS program to schools and communities.

This study used a qualitative descriptive approach enriched with quantitative, therefore in this study as a research instrument is a questionnaire that will be distributed throughout the SMP. Sintang country, to sharpen the researcher's own research results also became a direct instrument to collect data / information, both primary data and secondary which is based on the research aspects related to the implementation of BOS funds in Sintang.

The results of the analysis revealed that the BOS Coverage against poor student services ranging from 20% -33%. Barriers to implementation of BOS among others BOS disbursement is often too late, it is becoming disturbing teaching and learning activities. Among other recommendations, Unidirectional purpose BOS BOS fund utilization should really be directed to support the smooth operation of schools and learning process, sources of school funding comes from the APBD, BOS and the contribution of parents, The third component of the contribution of parents turned out the most dominant.

Keywords : BOS, *educational access* ;

ABSTRAK

Impelementasi Kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Sintang

SAMSUAR

Universitas Terbuka

samsuar@yahoo.com

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Sintang. Dalam penelitian BOS ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar cakupan dana BOS dalam rangka meningkatkan akses pendidikan bagi siswa/siswi keluarga miskin dan tidak mampu dan bagaimanakah dampak pelaksanaan program BOS terhadap sekolah maupun masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif yang diperkaya dengan kuantitatif, oleh karena itu dalam penelitian ini sebagai instrumen penelitian adalah kuesioner yang akan didistribusikan keseluruh SMP. Negeri di Sintang, untuk mempertajam hasil penelitian Peneliti sendiri juga menjadi instrumen yang langsung menggali data / informasi, baik data primer maupun skunder yang mendasarkan pada aspek-aspek penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan Program bantuan dana BOS di Kabupaten Sintang.

Hasil analisa mengungkapkan bahwa Cakupan BOS terhadap layanan siswa miskin berkisar 20 % -33%. Hambatan pelaksanaan BOS antara lain Pencairan BOS sering terlambat, hal ini menjadi mengganggu kegiatan belajar mengajar. Rekomendasi antara lain, Searah tujuan BOS hendaknya pemanfaatan dana BOS benar-benar diarahkan untuk operasional sekolah yang menunjang kelancaran proses belajar, sumber dana sekolah berasal dari APBD, BOS dan Sumbangan orang tua siswa, ketiga komponen ternyata sumbangan orang tua murid paling dominan.

Kata kunci : BOS, Akses pendidikan ;

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas Ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan TAPM dengan judul Implementasi Kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Pelayanan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Di Kabupaten Sintang. Adapun TAPM tersebut untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi pada Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka Jakarta, Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Administrasi Publik.

Selanjutnya, dalam menyelesaikan penulisan ini, Penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dengan segala kerendahan hati melalui halaman ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak khususnya kepada

1. Prof. Tian Belawati selaku Rektor Universitas Terbuka Jakarta
2. Suciati, M.Sc, Ph.D. selaku Direktur Universitas Terbuka Jakarta yang telah menerima dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Pontianak.

3. Dr. Bakran Suni selaku Pembimbing Pertama penulisan TAPM ini. Beliau dengan penuh ketelitian dan kesabaran tak henti-hentinya memberikan saran-saran dan masukan dalam penyempurnaan tulisan ini. Dr. Tita Rosita, M.Pd. selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu mengarahkan penulis dalam menyusun TAPM ini.
4. Kepala Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak yang telah memberikan saran dan masukan serta motivasi kepada penulis selama mengikuti studi.
5. Florentina Ratih Wulandari, S.IP, M.Si. selaku Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Terbuka yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis selama mengikuti studi.
6. Bupati Sintang dan Wakil Bupati Sintang serta Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang yang telah memberikan ijin dan dorongan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
7. Untuk keluarga besar penulis serta rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah banyak memberikan motivasi dan dorongan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dengan lancar

Semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan dan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Sintang, Desember 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAC.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kajian Teoritik	9
1. Kajian Teoritik Penelitian Terdahulu.....	9
2. Kebijakan Publik.....	11
3. Implementasi Kebijakan Publik.....	14
4. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik.....	22
5. Kebijakan Bidang Pendidikan.....	27
6. Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah.....	31
B. Kerangka Pemikiran.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Desain Penelitian	42
B. Populasi dan Sampel.....	43
C. Instrumen Penelitian	44
D. Prosedur Pengumpulan Data	44
E. Metode Analisis Data.....	47
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Temuan.....	49
B. Pembahasan.....	53
1. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Sintang.....	53
a. Cakupan Dana.....	53
b. Ketepatan Sasaran.....	55

c. Penerapan Skala Prioritas Dalam Penggunaan Dana.....	59
d. Sistem Pengawasan	63
e. Manfaat Program.....	71
2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Sintang.....	80
a. Komunikasi.....	85
b. Sumber Daya	89
c. Struktur Birokrasi.....	90
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	96
A. Simpulan.....	96
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	101

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1. Alokasi Dana BOS di Kabupaten Sintang Tahun 2012	5
4.1. Jumlah Siswa SMP Negeri Kabupaten Sintang Tahun 2011/2012	51
4.2. Jumlah Sekolah SMP Negeri Kabupaten Sintang Tahun 2011/2012	52
4.3. Tingkat Prosentase Penggunaan Dana Bos SMP Negeri Kabupaten Sintang Tahun 2011/2012	62
4.4. Media Pengawasan Dalam pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri di Kabupaten Sintang Tahun 2012	66
4.5. Kontribusi Program BOS Terhadap Siswa/Siswi Kurang Mampu/Miskin	72
4.6. Tingkat Daya Dukung Program BOS Terhadap Sekolah	76
4.7. Tingkat Intensitas Kegiatan Anak Didik Disekolah	77
4.8. Indikator keberhasilan pengelolaan Dana BOS Pada Jenjang SMP Negeri di Kabupaten Sintang Tahun 2012	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
2.1.	Model Proses Pelaksanaan Kebijakan	15
2.2.	Kerangka Pikir Penelitian	39

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Pedoman Observasi
- Lampiran 3 : Jumlah Siswa Miskin SMP. Negeri Kabupaten Sintang Yang Terlayani Dana BOS Tahun 2011/2012
- Lampiran 4 : Realisasi Dan Sumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (APBS) SMP Negeri Kabupaten Sintang Tahun 2011/2012

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu indikator kemajuan pembangunan suatu bangsa adalah tingkat capaian pembangunan sumber daya manusianya, bahkan pendidikan menjadi domain utama bagi setiap negara yang ingin maju dan ingin menguasai teknologi. Setiap negara mempunyai kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsanya tanpa terkecuali, Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 31 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Upaya untuk melaksanakan amanat tersebut Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia .

Visi Pendidikan Nasional adalah untuk mewujudkan sistem pendidikan yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab segala tantangan zaman yang selalu berubah. Adapun langkah-langkah kebijakan yang

diambil Pemerintah dalam mewujudkan visi tersebut antara lain;

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Meningkatkan mutu pendidikan yang mempunyai daya saing tingkat nasional, regional maupun internasional,
3. Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global,
4. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak secara utuh sejak usia dini, mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral,
5. Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan,
6. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Renstra Kementerian Pendidikan RI)

Searah dengan tujuan pendidikan nasional, pemerintah telah melakukan langkah-langkah reformasi atau menyempurnakan sistem pendidikan yang meliputi :

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses pembudayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, dimana dalam proses tersebut harus ada pendidikan yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik sehingga terjadi pergeseran paradigma proses pendidikan dari paradigma pengajaran keparadigma pembelajaran, Paradigma pengajaran yang menitikberatkan peran pendidik dalam menstransformasi pengetahuan bergeser keparadigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya, (2) Perubahan pandangan tentang peran manusia dari paradigma manusia sebagai sumberdaya pembangunan menjadi paradigma manusia sebagai subyek pembangunan secara utuh. (Renstra Kementerian Pendidikan RI)

Dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, sampai saat ini Pemerintah masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan,

baik permasalahan yang bersifat internal maupun eksternal, seperti tingkat kualitas pendidik yang belum memenuhi standar mutu, saranaprasarana sekolah yang masih kurang memadai serta terbatasnya anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah, selain faktor internal tantangan yang paling berat bagi bangsa Indonesia pada era globalisasi pada abad ke- 21 ini adalah bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing. Hanya dengan bermodalkan manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing suatu bangsa akan mampu bermitra dan berkompetisi pada tataran global. Pada hal kita tahu bahwa gambaran umum mutu sumber daya manusia Indonesia sebagaimana dilaporkan oleh UNDP setiap tahun menunjukkan tingkat pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia ternyata masih memprihatinkan, demikian juga peringkat Indeks Pertumbuhan Daya saing Indonesia masih sangat rendah belum sesuai yang kita harapkan, kondisi ini adalah sebuah realitas yang menjadi isyarat bahwa pemerintah dan masyarakat Indonesia harus bekerja keras secara terus menerus dan konsisten meningkatkan mutu pendidikan manusia dengan menempatkan pendidikan sebagai salah satu wahana dalam pembangunan manusia Indonesia yang cerdas, unggul dan berdaya saing.

Berangkat dari permasalahan tersebut di atas, Pemerintah telah mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan merealokasi

sebagian besar dananya ke empat program besar yang dirancang untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin, akibat peningkatan harga BBM. Keempat program tersebut adalah untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur perdesaan, dan bantuan langsung tunai. Salah satu program di bidang pendidikan yang mendapat alokasi anggaran cukup besar adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan dana ke sekolah-sekolah setingkat SD dan SMP yang bersedia memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan peserta program.

Seperti yang dihadapi oleh berbagai Kabupaten/Kota lainnya, Kabupaten Sintang yang berada di wilayah Propinsi Kalimantan Barat juga mendapat alokasi dana BOS dari pemerintah pusat. BOS di Kabupaten Sintang berada dibawah kendali Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sintang sebagai pelaksana program. Adapun data program BOS Di Kabupaten Sintang tahun 2012 sebagai berikut:

Tabel 1.1. Alokasi Dana BOS di Kabupaten Sintang Tahun 2012

Jenjang	Jumlah Siswa	Jumlah Sekola	Jumlah Dana (Rp)		
			APBN	APBD	TOTAL
SD	60.869	390	Rp. 35.304.020.000	Rp. 4.528.800.000	Rp. 39.832.820.000
SMP	17.218	108	Rp. 12.224.780.000	Rp. 2.686.008.000	Rp. 14.910.788.000

Sumber Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 2013.

Rincian alokasi dana BOS di Kabupaten Sintang di atas menunjukkan nominal yang besar, sehingga program ini merupakan

program dengan skala besar. Untuk jenjang SD/MI dan sederajat di Kabupaten Sintang tahun 2012 telah menghabiskan dana sebesar Rp. 39.832.820.000,- sedangkan untuk jenjang SMP/MTs besarnya dana mencapai Rp. 14. 910.788.000,-. Melihat alokasi anggaran yang tidak sedikit tersebut, diharapkan mampu meningkatkan akses dan mutu pendidikan di Kabupaten Sintang, khususnya berupa menurunnya angka putus sekolah di Kabupaten Sintang, sehingga masyarakat miskin bisa menikmati pelayanan pendidikan yang optimal.

Permasalahan Program BOS di Kabupaten Sintang, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program BOS belum dapat berjalan seperti yang diharapkan, masih terdapat siswa tidak mampu yang belum memperoleh layanan pendidikan secara memadai karena masih dibebani biaya pendidikan lainnya.
2. Dana BOS dipakai untuk membayar guru tidak tetap pada hal pembayaran guru bantu menggunakan anggaran Pemerintah Daerah atau alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Rendahnya tingkat akuntabilitas, penggunaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh sekolah tidak di publikasikan atau belum pernah dilakukan audit oleh Akuntan publik, sehingga akuntabilitas dan

kredibilitas masih diragukan.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui tingkat efektivitas capaian sasaran program BOS di Kabupaten Sintang sekiranya perlu dilakukan kajian melalui evaluasi program, dari sinilah maka penelitian ini akan mengangkat judul : **Implementasi Kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Sintang.**

B. Perumusan Masalah

Permasalahan pelaksanaan program BOS bagi SMP Negeri Sintang sangat kompleks. Walaupun berbagai instrumen telah diterbitkan, tetapi kondisi secara umum menunjukkan bahwa pelaksanaan program BOS belum mampu memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat miskin secara berkualitas.

Beberapa permasalahan di atas maka dalam fokus penelitian yang akan diangkat adalah sejauhmana Cakupan dana BOS dalam rangka meningkatkan akses pendidikan bagi siswa/siswi keluarga miskin atau tidak mampu serta seberapa besar dampak dana BOS bagi masyarakat maupun SMP Negeri selaku penerima BOS.

Dari uraian mengenai latar belakang masalah maka penelitian ini dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar cakupan dana BOS dalam rangka meningkatkan akses pendidikan bagi siswa/siswi keluarga miskin dan tidak

mampu bagi seluruh SMP Negeri di Kabupaten Sintang.

2. Bagaimanakah dampak pelaksanaan program BOS terhadap sekolah maupun masyarakat di Kabupaten Sintang.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan umum penelitian pelaksanaan program BOS untuk seluruh SMP Negeri Kabupaten Sintang adalah untuk mengumpulkan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program BOS, sedangkan tujuan khusus adalah untuk :

1. Menganalisis seberapa besar cakupan dana BOS bagi SMP Negeri dalam rangka meningkatkan akses pendidikan bagi siswa/siswi keluarga miskin atau tidak mampu.
2. Menganalisis seberapa besar dampak pelaksanaan program BOS bagi SMP Negeri terhadap sekolah maupun masyarakat di Kabupaten Sintang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan praktis dan kegunaan teori yang diuraikan di bawah ini :

1. Kegunaan Praktis : Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Sintang maupun pihak-pihak terkait dalam melakukan perbaikan pelaksanaan program BOS tahun berikutnya.
2. Kegunaan Teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna

bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam merumuskan Kebijakan Publik pada organisasi publik.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik

1. Kajian Teoritik Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya. Zulherman (2013) melakukan penelitian mengenai akuntabilitas implementasi program BOS di Sekolah Dasar Negeri Nomor 1 Nanga Ketungau Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang.

Hasil penelitian yang dilakukan Zulherman (2013) tersebut memperlihatkan dari Aspek Ketepatan Sasaran, program Bantuan Operasional Sekolah belum dapat disalurkan tepat waktu, dimana tiap awal triwulan seharusnya dana BOS sudah harus diterima. Pihak sekolah belum sepenuhnya menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai petunjuk yang telah ditetapkan. Masih adanya perbedaan jumlah bantuan yang diterima dengan jumlah data riil siswa yang ada pada sekolah. Penerapan Skala Prioritas Dalam Penggunaan Dana, pada Sekolah Dasar (SD) Nomor 1 Nanga Ketungau menunjukkan adanya peran kepala sekolah di dalam pemilihan alternatif penggunaan dana sangat dominan.

Sistem Pengawasan diketahui Dana BOS secara khusus belum pernah diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Sintang, audit Dana BOS pernah dilakukan

dalam bentuk Join Audit dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2009 dengan mengambil beberapa sampel, Secara khusus dana BOS telah dilakukan audit oleh BPKP dan BPK. Peran pengawasan unsur lainnya masih belum optimal.

Adapun faktor-faktor yang menentukan akuntabilitas implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri Nomor 1 Nanga Ketungau Kecamatan Ketungau Hilir sebagaimana penelitian Zulherman (2013) adalah Partisipasi Masyarakat, untuk pelaksanaan program BOS di kabupaten Sintang sendiri masih menemui beberapa kendala, yaitu masih minimnya partisipasi masyarakat. Secara sederhana partisipasi masyarakat ini diartikan di dalam proses perumusan Rancangan Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS). Idealnya perumusan RAPBS merupakan kesepakatan antara wali murid dengan sekolah dengan bantuan komite sekolah sebagai pihak yang menengahi proses itu.

Sumber Daya Manusia, bahwa Program BOS yang melibatkan sekolah dengan jenjang SD, keadaan gurunya masih sangat memprihatinkan. Lebih detail bahwa untuk jenjang SD yang merupakan salah satu sasaran program BOS, latar belakang pendidikan gurunya masih sangat memprihatinkan. Untuk Jenjang SD tidak semua SD mempunyai tenaga administrasi yang mengurus program BOS, sehingga semua urusan BOS diambil alih oleh guru yang merangkap mengajar kelas.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Zulherman (2013) dengan

penelitian ini adalah jika Zulherman (2013) lebih memfokuskan pada akuntabilitas implementasi program BOS di Sekolah Dasar Negeri, maka penelitian ini lebih kepada seberapa besar cakupan dana BOS dalam rangka meningkatkan akses pendidikan bagi siswa/siswi keluarga miskin dan tidak mampu bagi seluruh SMP Negeri di Kabupaten Sintang serta dampak pelaksanaan program BOS terhadap sekolah maupun masyarakat di Kabupaten Sintang.

2. Kebijakan Publik

Suatu Kebijakan merupakan strategi dari pemerintah di dalam memberikan suatu pelayanan publik. Keputusan ditetapkan agar tugas pelayanan yang diberikan dapat terarah dan mekanis serta tujuan yang jelas. Seperti kebijakan pemerintah dalam penanganan jalan dituangkan dalam bentuk program pembangunan prasarana jalan di Kabupaten Sintang. Istilah kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn (1988:10) yaitu : "Kebijakan berasal dari bahasa Yunani yaitu *polis* (negara-kota), kemudian masuk ke dalam bahasa latin *politiea* (negara) dan akhirnya ke dalam bahasa Inggris *policy* (kebijakan) dan *politics* (politik).

Jones (dalam Winarno, 2002: 14) mengemukakan bahwa "istilah kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktek sehari-hari, namun digunakan untuk mengartikan kegiatan atau keputusan yang berbeda ". Kebijakan cenderung diasumsikan sebagai suatu pilihan terhadap berbagai masalah dan sebagai solusi.

Menurut Islamy (1998:15) "Kebijakan adalah suatu program kegiatan yang dipilih oleh seseorang atau kelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai tujuan tertentu". Selanjutnya menurut Anderson (dalam Islamy, 1998: 17) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Dan menurut Friedrich (dalam Winarno, 2002:15) juga berpendapat bahwa "Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu".

Penggunaan istilah kebijakan ini sangat luas dan beraneka ragam serta meliputi beberapa aspek kehidupan dalam masyarakat. Hogwood dan Gunn (dalam Wahab, 1997:1) mengelompokkan beraneka ragam penggunaan istilah kedalam 10 macam, yaitu : sebagai suatu merek bagi bidang tertentu, suatu pernyataan mengenai tujuan umum yang dikehendaki, usulan-usulan khusus, keputusan pemerintah, bentuk pengesahan formal, program pengeluaran, hasil akhir, teori atau model dan proses.

Seiring dengan beberapa pendapat yang telah di kemukakan tersebut dapat dijelaskan bahwa ketika membicarakan kebijakan, maka konsep kebijakan itu adalah suatu pilihan dari berbagai alternatif yang ada sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan tidak hanya diarahkan pada diri sendiri atau

lingkungan kerja, tapi kebijakan sering dilihat pada aktor atau pelaku kebijakan yang ada. Kebijakan juga cenderung diarahkan pada lingkungan atau masyarakat luar. Dye (dalam Winarno, 2002:15) mengatakan bahwa : "Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan". Bertolak dari beberapa definisi atau pemahaman tentang kebijakan publik tersebut, Santoso (dalam Winarno, 2002:17) mengelompok berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain :

Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut kebijakan publik. Kedua, pendapat para ahli memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk ke dalam katagori ini terbagi atas dua, yakni : 1) mereka memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan-tujuan dan maksud tertentu, 2) mereka yang menaggap kebijakn publik sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Pengelompokan berbagai konsep mengenai kebijakan publik menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan sangat berpengaruh kepada persepsi masyarakat (publik) yang mengalami atau terkena dampak kebijakan tersebut. Konsep kebijakan publik juga mempunyai implikasi. Anderson, (dalam Winarno, 2002:18) mengungkapkan beberapa implikasi konsep kebijakan publik, yaitu:

Pertama, titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud dan tujuan, bukan prilaku secara serampangan. Kedua, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri. Ketiga, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau

mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Keempat, kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif.

Dengan memperhatikan implikasi tersebut, maka proses pembuatan kebijakan merupakan suatu tugas yang kompleks, karena harus melibatkan banyak unsur dan variabel yang harus dikaji. Dalam menentukan kebijakan diperlukan tahap-tahap proses kebijakan publik. Winarno (2002:28-30) mengemukakan bahwa "tahap-tahap kebijakan publik, antara lain : tahap penyusunan agenda, tahap formulasi, tahap adopsi kebijakan, tahap implementasi kebijakan, dan tahap penilaian/evaluasi kebijakan". Berdasarkan tahapan-tahapan penetapan kebijakan tersebut dapat dipahami bahwa menentukan kebijakan bukan pekerjaan yang mudah, karena kekeliruan atau pengabaian salah satu tahapan proses kebijakan akan menghadapi kemungkinan kegagalan pencapaian tujuan kebijakan itu sendiri.

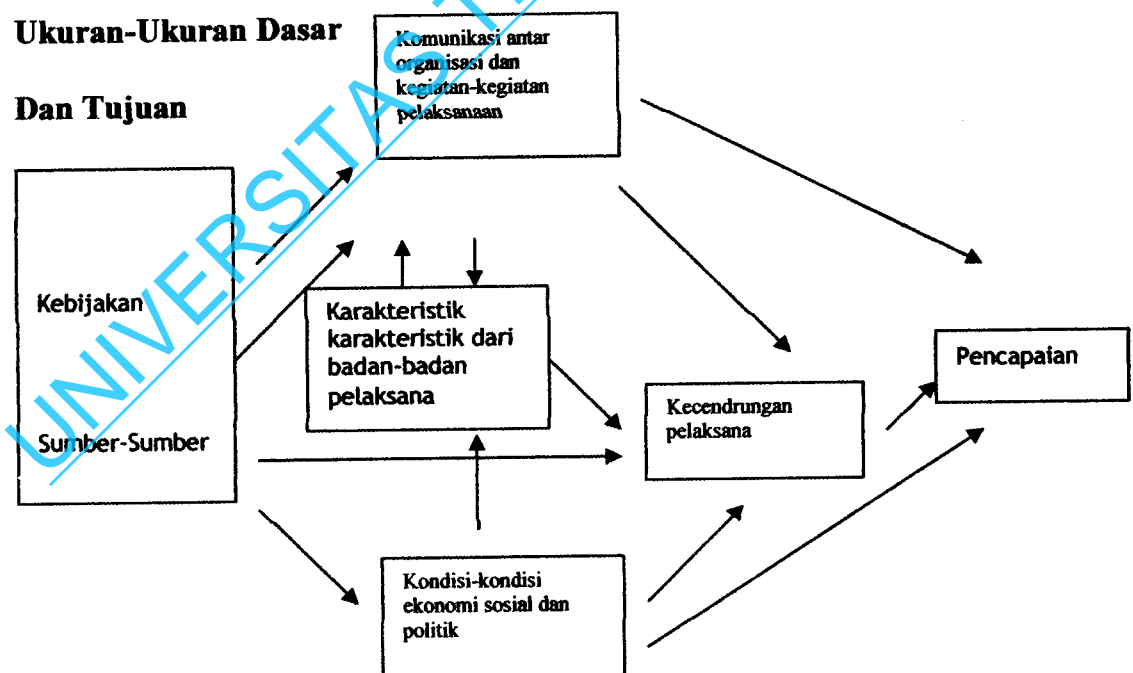
3. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Jones (1991:296) implementasi adalah "suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program". Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 1997:65) kegiatan untuk mengoperasikan ini berisi "tindakan-tindakan yang dilakukan oleh berbagai pihak (individu/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta) dalam kebijakan tersebut guna mencapai tujuan yang diinginkan". Keberadaan implementasi kebijakan pada dasarnya adalah "jembatan" yang menghubungkan antara tindakan-tindakan dengan tujuan yang ingin dicapai

dari suatu kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh Pressman dan Wildavsky (dalam Jones, 1991: 295) bahwa “implementasi/penerapan adalah kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan”.

Salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002: 110) adalah model proses pelaksanaan kebijakan itu sendiri sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1. Model Proses Pelaksanaan Kebijakan



Sumber: Van Meter Dan Van Horn (dalam Winarno, 2002:111)

Dari gambar sebagaimana tersaji di atas menurut Van Meter Dan Van Horn (dalam Winarno, 2002:111) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Ukuran-Ukuran Dasar Dan Tujuan Kebijakan.** Identifikasi indikator-indikator merupakan tahap krusial dalam analisis pelaksanaan kebijakan. Indikator-indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Hal ini disebabkan bahwa tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena pelaksanaan tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.
2. **Sumber-Sumber Kebijakan.** Di samping ukuran-ukuran dasar dan sasaran kebijakan yang juga perlu mendapat perhatian dalam proses pelaksanaan kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar pelaksanaan yang efektif.
3. **Komunikasi Antar Organisasi Dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan.** Pelaksanaan akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian kebijakan. Oleh karena itu sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan pelaksanaan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi.
4. **Karakteristik Badan Pelaksana.** Karakteristik badan pelaksana tidak dapat dipisahkan dari struktur birokrasi itu sendiri. Dalam struktur birokrasi tersebut beberapa hal yang mungkin berpengaruh dalam mengpelaksanaan kebijakan adalah: kompetensi dan ukuran staf, tingkat pengawasan, tingkat komunikasi, sumber-sumber politik, vitalitas, serta kaitan formal dan informal dengan badan pelaksana keputusan maupun pembuat keputusan.
5. **Kondisi-Kondisi Sosial Ekonomi Dan Politik.** Dampak kondisi-kondisi sosial ekonomi dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar dalam beberapa tahun terakhir ini. Ada beberapa aspek yang kiranya mendapat tekanan mengenai lingkungan sosial ekonomi dan politik yang mempengaruhi yurisdiksi di mana pelaksanaan itu dilaksanakan. Aspek-aspek tersebut antara lain: Apakah sumber-sumber ekonomi, sosial dan politik dalam organisasi pelaksana cukup mendukung pelaksanaan yang berhasil dan sejauh mana atau bagaimana kondisi-kondisi ekonomi sosial dan politik dipengaruhi oleh implementasi kebijakan itu sendiri.
6. **Kecendrungan Pelaksana (*Implementators*).** Setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi pelaksana dalam yurisdiksi dimana kebijakan tersebut dihasilkan. Terdapat beberapa unsur tanggapan pelaksana yang dapat

mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yaitu: kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadap penerimaan, netralitas, penolakan dan instensitas tanggapan terhadap kebijakan.

7. Pencapaian. Suatu kebijakan negara yang dibuat bukanlah untuk kepentingan politik belaka tetapi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggota masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu diperlukan suatu proses perumusan yang cukup bijaksana dan hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Dalam proses perumusan kebijakan pada umumnya dilakukan melalui beberapa tahap dimulai dari perumusan masalah, penyusunan agenda pemerintah, perumusan usulan kebijakan, pengesahan, pelaksanaan sampai pada penilaian kebijakan.

Sejalan sebagaimana yang diungkapkan oleh Van Meter Dan Van Horn di atas, menurut Thamrin (1997:59) dalam proses implementasi kebijakan masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin di jawab adalah:

1. Bagaimana kebijakan diimplementasikan ?
2. Siapa saja yang dilibatkan dalam proses implementasi tersebut ?
3. Bagaimana interaksi antara orang-orang atau kelompok-kelompok yang terlibat dalam penerapan kebijakan itu ?
4. Siapa secara formal diberikan wewenang melaksanakan program dan siapa secara formal lebih berkuasa ?
5. Bagaimana cara kerja birokrasi pusat dan daerah serta agensi lain yang terlibat dalam proses pelaksanaan program ?
6. Bagaimana cara atasan melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan?
7. Bagaimana tanggapan target group terhadap kebijakan yang dilaksanakan ?

Menurut Ashari (2003:45) beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar implementasi kebijakan dapat efektif yaitu: “(1) Organisasi harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pelayanan publik (memenuhi *performance*) serta (2) Isi pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan (*need*) dari masyarakat. Persyaratan ini berhubungan dengan utilitas

fasilitasi pelayanan publik”.

Menurut Anderson (dalam Islamy, 1998:612) “studi evaluasi kebijakan pada intinya dapat diartikan sebagai penilaian atau pengukuran kebijakan, termasuk isi, implementasi dan dampaknya”. Dampak kebijakan merupakan perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat dari adanya implementasi kebijakan.

Perubahan-perubahan dimaksud dapat berupa yang diharapkan (mengandung nilai positif) dan yang tidak diharapkan (mengandung nilai negatif). Perubahan yang diharapkan dapat dinilai melalui nilai manfaatnya terhadap kehidupan masyarakat terutama yang menjadi kelompok sasaran kebijakan publik. Lazimnya manfaat ini tertuang dalam tujuan yang ada dalam kebijakan publik itu sendiri. Sedangkan Perubahan yang tidak diharapkan dapat dinilai melalui adanya kerugian atau ancaman terhadap kehidupan masyarakat terutama yang menjadi kelompok sasaran kebijakan publik. Biasanya perubahan yang tidak diharapkan ini tidak tertuang dalam tujuan yang ada dalam kebijakan publik.

Menurut Winarno, (2002:19) sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat difahami secara lebih baik bila konsep ini dirincikan menjadi beberapa kategori seperti, “tuntutan-tuntutan kebijakan (*policy demands*), keputusan-keputusan kebijakan (*policy decisions*), pernyataan-pernyataan kebijakan (*policy statements*), hasil-hasil kebijakan (*policy out put*) dan dampak-dampak kebijakan (*outcomes*)”. Tuntutan-tuntutan kebijakan adalah

berupa desakan agar pejabat-pejabat pemerintah mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan mengenai suatu masalah tertentu. Keputusan kebijakan merupakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik. Pernyataan-pernyataan kebijakan adalah pernyataan-pernyataan resmi atau artikulasi-artikulasi kebijakan baik berupa peraturan atau perundangan-undangan maupun pidato-pidato resmi pejabat pemerintah. Sementara itu, hasil-hasil kebijakan lebih berpijak pada manifestasi nyata kebijakan publik, sedangkan dampak kebijakan lebih merujuk pada akibat-akibat kebijakan bagi masyarakat baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan.

Membicarakan masalah dampak kebijakan maka tidak akan terlepas dari evaluasi atau penilaian kebijakan, hal tersebut disebabkan karena penilaian adalah tahap terakhir dari proses perumusan kebijakan. Sebagai salah satu kegiatan, penilaian kebijakan tidak hanya dilakukan dengan mengikuti aktivitas-aktivitas sebelumnya yaitu pengesahan dan pelaksanaan, tetapi terjadi pada seluruh aktivitas fungsional lain meliputi penilaian substansi kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan dampak kebijakan. Menurut Islamy (1998:113) dari sudut spesifikasi obyeknya berarti "menilai hasil-hasil pelbagai macam program-program yang dilaksanakan pemerintah sesuai dengan problema-problema yang dihadapi oleh masyarakat, misalnya dibidang kesehatan, apakah telah terlaksana dengan baik atau belum". Kemudian dari penilaian

tersebut akan memberikan hasil akhir atau kesimpulan dari program-program pemerintah apakah efektif atau tidak, mempunyai dampak positif yang lebih besar dari dampak negatif atau sebaliknya.

Penilaian kebijakan negara biasanya banyak dilakukan untuk mengetahui dampak kebijakan negara. Penilaian dilakukan karena tidak semua program kebijakan pemerintah meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi kebijakan pemerintah gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian penilaian kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan pemerintah yang telah dilaksanakan meraih dampak atau manfaat yang diinginkan.

Menurut Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2002:166) penilaian kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda "Tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya". Dengan demikian menurut Winarno (2002:166) tentang tugas-tugas tersebut adalah:

Tugas pertama merujuk pada usaha untuk melihat apakah program kebijakan publik mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan atautah tidak. Bila tidak, faktor-faktor apa yang menjadi penyebabnya? Misalnya, apakah karena terjadi kesalahan dalam merumuskan masalah atautah karena faktor-faktor yang lain? Tugas kedua dalam evaluasi kebijakan pada dasarnya berkait erat dengan tugas yang pertama. Setelah kita mengetahui konsekuensi-konsekuensi melalui penggambaran dampak kebijakan publik, maka kita dapat mengetahui apakah program

kebijakan yang dijalankan sesuai atau tidak dengan dampak yang diinginkan. Dari sini kita dapat melakukan penilaian apakah program yang dijalankan berhasil atau gagal? Dengan demikian, tugas kedua dalam evaluasi kebijakan adalah menilai apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak dalam meraih dampak yang diinginkan.

Bila demikian, berbicara mengenai dampak hal tersebut berarti adanya akibat, pengaruh atau konsekuensi yang ditimbulkan dari pelaksanaan suatu kegiatan atau program, baik itu akibat yang diinginkan maupun akibat yang tidak diinginkan. Bila dihubungkan dengan pengertian kebijakan negara yang diberikan oleh Islamy serta pengertian dari implementasi kebijakan, maka dampak kebijakan negara berarti suatu akibat, pengaruh atau konsekuensi dari serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan demi kepentingan seluruh masyarakat, baik itu akibat yang diinginkan maupun akibat yang tidak diinginkan.

Dampak tersebut mempunyai beberapa macam dimensi yang harus dipertimbangkan dengan seksama. Adapun menurut Anderson (dalam Islamy, 1998:114) dimensi dampak kebijakan negara itu meliputi :

1. Dampak kebijakan yang diharapkan (*intended consequences*) atau tidak diharapkan (*unintended consequences*) baik pada problemanya maupun pada masyarakat.
2. Dampak kebijakan pada situasi atau keadaan orang-orang atau kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan yang dinamakan dengan dampak yang melimpah (*externalities or spillover effects*).
3. Dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang atau kondisi yang akan datang.
4. Dampak kebijakan terhadap biaya langsung (*direct costs*) yang harus dikeluarkan untuk program-program kebijakan pemerintah.

5. Dampak kebijaksanaan terhadap biaya tidak langsung (*indirect costs*) yang ditanggung dan dikeluarkan oleh masyarakat sebagai akibat adanya program-program kebijakan pemerintah.

Perlu ditegaskan bahwa dampak kebijaksanaan (*policy outcomes* atau *policy consequences*) berbeda pengertiannya dengan hasil kebijakan (*policy outputs*). Hasil kebijakan adalah apa yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan negara. Sementara dampak kebijakan adalah akibat-akibat atau konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan negara tersebut. Menurut Winarno (2002:184) "Pada dasarnya, setiap kebijakan mempunyai tujuan-tujuan tertentu atau ingin meraih dampak-dampak yang diinginkan. Namun demikian, karena proses kebijakan merupakan proses yang kompleks, maka seringkali program-program kebijakan tidak dapat meraih tujuan atau dampak yang diinginkan".

4. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Van Metter dan Carl Van Horn (dalam Agustino, 2006:141-142) terdapat 6 (enam) variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu: Ukuran dan tujuan kebijakan; Sumberdaya; Karakteristik agen pelaksana; Sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana; Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; Lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Van Matter dan Van Horn (dalam Agustino, 2005:142) mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik.

Menurut Agustino (2006:157) beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan atau tidaknya suatu kebijakan publik, yaitu:

- a. Faktor penentu pemenuhan kebijakan:
 1. Respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah.
 2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan
 3. Adanya sanksi hukum
 4. Adanya kepentingan publik.
 5. Adanya kepentingan pribadi
 6. Masalah waktu
- b. Faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan:
 1. Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada.
 2. Tidak adanya kepastian hukum.
 3. Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi
 4. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat banyak model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli sesuai dengan kerangka berpikir masing-masing. Model-model tersebut pada dasarnya adalah berkaitan dengan variabel-variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi, yang masing-masing variabel atau faktor tersebut saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy makers* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Berikut ini hanya akan dikemukakan beberapa model dalam implementasi kebijakan yang dianggap cukup penting untuk diketahui.

Model pertama adalah model yang dikembangkan oleh George Edwards III (1980). Dalam pandangan Edwards III (dalam Subarsono, 2005:90), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel atau faktor, yakni :

1. Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target groups*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
2. Sumber daya. Sumberdaya tersebut dapat berupa sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial sehingga implementasi tidak akan berjalan efektif.
3. Disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
4. Struktur Birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP), yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Kemudian Van Meter dan Van Horn yang disebut sebagai *A Model of Policy Implementation Process* menyatakan ada 6 (enam) variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

1. Standar dan Sasaran kebijakan; Harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.
2. Sumberdaya; Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non manusia (*non human resources*).
3. Komunikasi dan Hubungan Antar Organisasi
Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan

- koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
4. **Karaktersistik Agen Pelaksana**, yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
 5. **Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi**. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
 6. **Disposisi implementor**. Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yakni : a) respons implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Model selanjutnya adalah model implementasi yang dikembangkan oleh

Merilee S. Grindle (1980). Menurut Grindle (dalam Subarsono, 2005:93) :

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni : isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan mencakup :

1. Sejahter mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan (*interest affected*).
2. Jenis manfaat yang diterima oleh *target groups* (*type of benefits*).
3. Sejahter mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan (*extent of change envisioned*).
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat (*site of decision making*).
5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci (*program implementor*); dan
6. Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai (*resources committed*).

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup :

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan (*power, interest, and strategies of actors involves*).
2. Karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa (*Institution and regime characteristics*); dan

3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran (*compliance and responsiveness*).

Kemudian Warwick (dalam Damar, 2003:51) mengemukakan bahwa “pada tahap implementasi, berbagai kekuatan akan berpengaruh baik faktor yang mendorong atau memperlancar, maupun kekuatan yang menghambat atau memacetkan pelaksanaan program”. Menurutnya, terdapat dua kategori faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu :

1. Faktor-faktor pendorong (*facilitating conditions*), yang terdiri dari : a) *commitment of political leaders*; b) *organizational capacity*; c) *the commitment of implementations*; d) dukungan dari kelompok kepentingan.
2. Faktor-faktor penghambat (*impeding condition*), yang terdiri dari : a) banyaknya pemain (*actors*); b) terdapat komitmen atau loyalitas ganda; c) kerumitan yang melekat pada kegiatan itu sendiri; d) jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak; e) waktu dan perubahan kepemimpinan.

Selanjutnya dalam kaitan dengan kebijakan, faktor pendukung atau sebab-sebab anggota masyarakat melaksanakan suatu kebijakan menurut Anderson (dalam Wahab, 1997:114) adalah :

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah.
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan
3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan.
4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan-kebijakan kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam pengimplementasiannya.

Selain faktor-faktor pendukung di atas, terdapat juga beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan publik. Masih menurut Anderson (dalam Wahab, 1997:76) mengemukakan faktor-faktor yang menjadi

penghambat pelaksanaan kebijakan publik atau sebab-sebab anggota masyarakat menolak suatu kebijakan yaitu :

1. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijaksanaan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu.
2. Karena keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok atau perkumpulan, dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai dengan peraturan hukum atau keinginan pemerintah.
3. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara para anggota, yang cenderung bertindak dengan menipu atau melawan hukum.
4. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan ukuran kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang terhadap hukum atau kebijakan publik.
5. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam karena kebijakan tersebut bertentangan dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

5. Kebijakan Bidang Pendidikan

Seiring dengan dinamika perkembangan kehidupan sosial politik masyarakat, konsep *governance* telah menjadi wacana yang banyak diperbincangkan banyak pihak. Telah muncul pemahaman yang kuat dari berbagai kalangan, terutama para akademisi bahwa pola-pola lama penyelenggaraan tata kelola pemerintahan sudah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan pola-pola baru merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik (*Good governance*).

Good governance sebagai sebuah sistem mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang menunjukkan cara kerja atau proses operasi yang dijalankan

oleh sistem tersebut. Karakteristik yang dimilikinya akan menuntun bagaimana sistem *governance* akan dilaksanakan, karena didalamnya terdapat prinsip-prinsip dasar yang dioperasionalkan melalui tindakan-tindakan konkrit pada praktek *governance*. UNDP memberikan beberapa karakteristik *good governance* (Mardiasmo, 2002: 24-25) sebagai berikut:

- a. *Participation* (partisipasi), yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- b. *Rule of law*, yaitu kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- c. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan masyarakat memperoleh informasi. Apapun informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, harus secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan.
- d. *Responsiveness*. Setiap lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.
- e. *Consensus Orientation*. Adanya keharusan untuk memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- f. *Equity*. Setiap individu dalam masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- g. *Efficiency and effectiveness*. Pengelolaan sumberdaya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
- h. *Accountability*, yaitu pertanggungjawaban kepada public atas aktivitas yang dilakukannya.
- i. *Strategic vision*. Setiap penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Dari kesembilan karakteristik *good governance* yang diberikan oleh UNDP tersebut, paling tidak ada lima karakteristik yang jelas-jelas menunjukkan perlunya membangun sinergi antara pemerintah, masyarakat dan sektor privat yang didasari semangat kebersamaan dan lebih mementingkan kepentingan publik. Kelima karakteristik tersebut adalah: *participation*,

transparency, responsiveness, equity dan accountability. Namun upaya mewujudkan konsep *governance* dalam pengelolaan urusan publik bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Berbagai kendala atau hambatan mewujudkannya di Indonesia masih cukup banyak. Selain pengalaman sejarah yang didominasi rezim otoriter dimana peran pemerintah sangat dominan dan memarjinkan peran swasta dan masyarakat, juga masing-masing domain memiliki potensi ancaman untuk saling mendominasi antara satu dengan lainnya. Disaat yang sama, pemahaman terhadap konsep *governance* juga belum sepenuhnya dipahami oleh masing-masing domain yang ada.

Salah satu barang publik yang memiliki peran penting dalam kehidupan suatu negara adalah pendidikan. Indonesia adalah suatu negara yang fokus pada pembangunan pendidikan. Hal ini dapat dipahami dari konstitusi negara, khususnya pada pembukaan UUD 1945 tercermin dari pernyataan yang berbunyi “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Untuk mendukung tujuan tersebut, dalam pasal 31 ditegaskan bahwa (1) tiap-tiap negara berhak mendapat pengajaran dan (2) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Mengacu pada landasan konstitusional seperti yang tertera dalam UUD 1945, penyelenggaraan pembangunan sektor pendidikan telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan dan program pokok. Namun hasil yang diperoleh dirasakan masih belum mampu menyelesaikan berbagai permasalahan pendidikan yang sangat kompleks. Seperti yang

dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, bahwa salah satu dari sebelas permasalahan pokok pembangunan nasional adalah kualitas sumber daya manusia Indonesia yang masih rendah tercermin pada pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memenuhi hak-hak dasar warga negara (RPJM Nasional, 2004: 1.1-5).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, lahir pemikiran agar sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Dari kerangka pemikiran tersebut, kemudian terbitlah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara dan karenanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

6. Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah

Pemerintah melalui Program Kompensasi Pengurangan Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) berusaha mengurangi beban masyarakat Indonesia. Program PKPS-BBM muncul sebagai satu harapan baru bagi masyarakat di tengah beban hidup masyarakat yang berat. Salah satu sektor yang akan diberi bantuan adalah sektor pendidikan. Pemberian bantuan di bidang pendidikan merupakan langkah maju pemerintah. Langkah ini juga sejalan dengan amanat UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang

mewajibkan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran sebesar 20% untuk pendidikan. Dengan adanya PKPS-BBM diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat di bidang pendidikan, khususnya untuk jenjang pendidikan dasar.

Kebijakan PKPS-BBM secara substansial berisi dua hal penting yaitu, 1) Bantuan Operasional Sekolah atau BOS, dan 2) Bantuan Khusus murid. Kedua hal tersebut dilaksanakan secara bersama-sama demi keseimbangan program. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa, namun di sisi lain sekolah masih tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat⁹. Sedangkan Bantuan Khusus Murid (BKM) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatkeluarga kurang / tidak mampu akan layanan pendidikan jenjang sekolah lanjutan atas dan yang sederajat (SLA dan sederajat).

Bantuan Operasional Pendidikan (BOS) adalah sebuah kebijakan yang berbentuk jaminan sekolah gratis untuk jenjang pendidikan dasar. Jaminan ini berupa pemberian bantuan kepada semua siswa-siswi melalui penyelenggara wajib belajar 9 tahun atau yang disebut sekolah. BOS diadakan sebagai respon pemerintah terhadap tingginya disparitas partisipasi sekolah antar kelompok masyarakat. Untuk itulah, pemerintah mengeluarkan BOS, sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi tingginya disparitas partisipasi sekolah. Dengan

adanya BOS diharapkan pada tahun 2006 APK rata-rata mampu mencapai 96% dengan tetap memperhitungkan pemerataan.

Untuk menghindari adanya penyimpangan dan pencapaian tujuan secara maksimal, prinsip akuntabilitas perlu diterapkan di dalam pengelolaan BOS sebagai wujud penerapatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab para stakeholder baik yang sifatnya internal kepada pimpinannya maupun eksternal kepada masyarakat. Terciptanya akuntabilitas di dalam pengelolaan BOS akan tetap menjaga dan meningkatkan sumberdaya publik, dalam hal ini dana BOS, serta akan tetap memberi manfaat kepada penggunanya. Akuntabilitas BOS sangat didukung oleh partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan maupun pengawasan BOS. Partisipasi masyarakat merupakan syarat utama jika akuntabilitas ingin tetap ditegakkan. Hal tersebut akan menumbuhkan pola komunikasi yang dua arah, sehingga partisipasi merupakan media *check and balance* yang efektif. *Check and balance* dilakukan agar kehidupan kenegaraan dapat berjalan stabil, yaitu saling kontrol antara pemerintah dan masyarakat. Kontrol tersebut dilakukan agar masing-masing pihak tidak melakukan sesuatu di luar kemampuan atau kewenangannya.

Landasan hukum dalam pelaksanaan Program Kebijakan Publik Terhadap Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Sintang, bidang pendidikan

didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku. Perundang-undangan yang dimaksud antara lain:

1. Pasal 4 ayat 1 UUD 1945
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 1965 tentang pembentukan Badan pemeriksaan keuangan.
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999.
4. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Bendaharawan wajib memungut Pajak Penghasilan.
6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
7. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
8. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
9. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
10. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
11. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
12. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1998.

13. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998.
14. Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
15. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan dan Kewenangan Proponasi sebagai Daerah Otonom.
16. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
17. Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2000. tentang Perubahan Tarif Biaya Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenai Biaya Materai.
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kepmen/ 036/U/1995 tentang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan pendidikan dan Komite Sekolah.
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran.
22. Keputusan Mendiknas No. 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan

Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Tujuan Program BOS menurut Buku Petunjuk Pelaksanaan 2005: "Program bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa, tetapi sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat".

Sedangkan tujuan program BOS menurut Buku Panduan 2006: "Program bantuan Operasional sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun"

Umumnya penyaluran dana telah dilakukan sesuai dengan alur yang ditetapkan dalam juklak. Kebijakan untuk menyalurkan dana BOS langsung ke rekening sekolah juga dinilai cukup tepat karena pada umumnya berjalan lancar dan dana diterima secara utuh. Namun keterlambatan penyaluran dana, bahkan pada semester 2 Tapel.2005/2006, membuat banyak sekolah mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya dan menunda pembayaran guru honor atau terpaksa berhutang ke berbagai pihak.

Selain itu, terdapat beberapa perbedaan mekanisme penyaluran dana BOS, cara penunjukan lembaga penyalur dan kebijakan lain berkenaan dengan pengaturan rekening sekolah, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja penyaluran dana. Di kebanyakan propinsi penunjukan lembaga penyalur tidak

dilakukan secara terbuka. Di beberapa propinsi, penunjukan lembaga penyalur dan pembatasan tempat rekening sekolah, yang tidak mempertimbangkan kemudahan layanan dan aksesibilitas sekolah, cenderung menambah beban biaya dan waktu bagi sekolah dalam mencairkan dana.

Ada beberapa persoalan dalam pengelolaan dana BOS oleh sekolah, khususnya berkaitan dengan kapasitas sekolah dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), pengaturan pengambilan dana dari rekening sekolah, penggunaan dana, dan ketidakjelasan aturan mengenai bunga bank dan pembayaran pajak.

Pada beberapa sekolah, peran kepala sekolah dalam memutuskan penggunaan dana BOS dan penyusunan RAPBS sangat dominan. Di beberapa propinsi satuan kerja membuat persyaratan tambahan untuk pencairan dana dari rekening sekolah, di luar juklak dan juknis, dengan alasan perlunya pengawasan.

Persyaratan tersebut dalam pelaksanaannya menambah birokrasi prosedur pemanfaatan dana BOS oleh sekolah. Selain itu, banyak sekolah menghadapi masalah ketidakjelasan ketentuan tentang bunga tabungan dan rumitnya prosedur pembayaran pajak atas penggunaan dana BOS.

Penilaian berbagai pihak terhadap ketentuan 11 jenis penggunaan dana berbeda-beda, namun umumnya menganggap ketentuan tersebut cenderung terlalu sempit (terbatas) karena tidak dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan masing-masing sekolah. Oleh karenanya, realisasi penggunaan dana BOS tidak

selalu sesuai dengan RAPBS dan ketentuan 11 jenis penggunaan menurut juklak 2005 atau 2006.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban dana BOS di sekolah-sekolah sampel, realisasi penggunaan dana BOS yang terbesar adalah untuk pembayaran honor guru, kegiatan belajar mengajar, pembelian alat tulis kantor, dan pembelian buku pelajaran pokok.

Aturan BOS yang ada dari tahun ke tahun semakin spesifik, hal ini bertujuan agar penggunaan dana BOS semakin minim kesalahan. Pada buku petunjuk dana BOS tahun 2005, aturan mengenai larangan penggunaan dana belum ada. Komponen yang dapat dibiayai juga sedikit. Pada tahun 2012 ini, belum semua sekolah di Indonesia mendapatkan dana BOS. Begitu juga dengan SMPN di Kabupaten Sintang. Buku petunjuk tahun 2006 sampai 2008 berisi aturan yang hampir sama. Komponen yang dapat dibiayai dengan dana BOS jumlahnya semakin banyak. Larangan penggunaan juga sudah dicantumkan di dalam panduan. Contoh aturan baru yang muncul di tahun 2008 adalah dana BOS diperbolehkan untuk membeli komputer. Panduan dana BOS tahun 2009 sampai 2011 komponen-komponen yang bisa dibiayai dan tidak boleh dibiayai sudah lebih terinci.

Misalnya penggunaan dana untuk ulangan umum, dalam aturan dijelaskan biaya-biaya yang diperbolehkan adalah untuk fotocopy, honor pengoreksi, dan honor penyusunan raport. Fokus penggunaan dana BOS juga sudah semakin jelas. Yaitu pembelian buku untuk dipinjamkan kepada siswa.

Terlebih lagi ditekankan dalam peraturan tahun 2011 bahwa jumlah buku harus mencukupi kebutuhan siswa yang ada. Dalam penggunaan dana BOS sebelumnya, pembelian buku hanya terfokus pada buku untuk koleksi perpustakaan. Aturan mengenai buku apa saja yang harus dibeli juga ada dalam panduan tahun 2009 sampai tahun 2011. Aturan baru yang ada mengenai buku ini memperjelas jenis buku yang harus dibeli. Diharapkan dengan adanya standar yang jelas, tidak terjadi pembelian buku berkualitas di bawah standar.

A. Kerangka Pemikiran

Memperhatikan uraian – uraian teoritis yang dikemukakan sebelumnya, maka Kerangka Pikir Alur Penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2. Kerangka Pikir Penelitian



Faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam penelitian ini menggunakan pendapat George Edwards III. Dalam pandangan Edwards III (dalam Subarsono, 2005:90), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel atau faktor, yakni :

1. Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target groups*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
2. Sumber daya. Sumberdaya tersebut dapat berupa sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial sehingga implementasi tidak akan berjalan efektif.
3. Disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
4. Struktur Birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP), yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah berperan dalam percepatan program pendidikan belajar 9 tahun dengan melihat data sejak tahun 2011, pemerintah mulai melakukan perubahan tujuan pendekatan dan orientasi BOS. Program BOS ke depan bukan hanya berperan untuk mempertahankan angka partisipasi kasar, namun juga harus berkontribusi penting untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar, mengingat laju pertumbuhan aliran dana BOS di kab sintang yang cenderung lambat dan

kurang signifikan dan merata di beberapa daerah, untuk itu diperlukan beberapa kajian untuk program-program yang akan dilaksanakan guna menunjang orientasi BOS di tahun 2012.

Wawasan tentang pendidikan sebagai proses belajar sepanjang hayat, menekankan pentingnya tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan kegiatan wajib belajar kepada masyarakatnya. Sehingga pemerintah membuat suatu perancangan dan implementasi program wajib belajar gratis yaitu dengan adanya program bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional pendidikan. Dengan hal ini diharapkan membantu seluruh masyarakat Indonesia dalam mengikuti program wajib belajar sembilan tahun.

Dalam proses program dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada SMP N Kabupaten Sintang dibutuhkan suatu analisa kebijakan yang harus memuat secara terperinci bagaimana proses penerimaan dan pengeluaran kas dana bantuan operasional sekolah (BOS) sehingga laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat penyedia informasi untuk pengendalian internal.

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan adanya Analisa Kebijakan Publik Terhadap Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Sintang dapat membantu pemerintah dan manajemen sekolah dalam menganalisis program dana bantuan operasional sekolah (BOS). Sehingga tersedianya informasi yang akurat dan pengendalian internal yang baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan menggambarkan apa adanya mengenai suatu variabel, gejala, keadaan atau fenomena sosial tertentu. Dalam hal ini guna menganalisis data yang diperoleh secara mendalam dan menyeluruh, dengan harapan dapat diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan Program BOS, faktor pendukung dan faktor penghambat serta dampaknya terhadap angka partisipasi yang telah memperoleh layanan BOS di Kabupaten Sintang.

Data kuantitatif yang berbentuk tabel-tabel dan berupa angka-angka yang dikumpulkan akan ditampilkan dilakukan analisis dan pembahasan secara detail, digunakan untuk mendukung analisis secara keseluruhan sebagai pembuktian bagi fenomena-fenomena yang sedang diteliti, yang dalam hal ini tentang pelaksanaan Program bantuan dana BOS dengan sasaran utama adalah Lembaga-lembaga pendidikan dasar (SD dan SMP) di Kabupaten Sintang selaku penerima bantuan dana, baik sebelum kegiatan selama melakukan kegiatan operasional dan sudah mendapatkan bantuan dana bantuan BOS.

Sebagaimana dikemukakan Lexy J. Moleong (2001:122) peneliti langsung masuk ke lapangan dan berusaha mengumpulkan data secara lengkap sesuai dengan pokok permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kebijakan Program pemberian bantuan dana BOS. Data yang dihimpun sesuai fokus penelitian berupa kata-kata, tindakan, situasi, dokumentasi dan peristiwa yang diobservasi. Pengumpulan data/informasi ini peneliti sekaligus sebagai instrumen yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*Indepth interview*), oleh karenanya Peneliti akan mencatat, serta menggunakan dukungan alat perekam atau tape recorder, dan mengamati perilaku orang yang diwawancarai.

B. Populasi dan Sampel

Suharsimi Arikunto (1998 : 115) mengemukakan bahwa “ Populasi merupakan keseluruhan subyek penelitian” Pengertian tentang populasi merupakan keseluruhan obyek atau sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian, dan dapat memberikan informasi yang berguna bagi masalah penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua SMP Negeri atau sejumlah 72 SMP Negeri yang ada di Kabupaten Sintang.

Metode Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling, yaitu teknik penentuan sampel penelitian dilakukan dengan menetapkan wilayah-wilayah populasi sebagai anggota populasi untuk membentuk populasi kecil yang lebih homogen.

Adapun jumlah sampel adalah 2 SMP Negeri

C. Instrumen Penelitian

Suatu penelitian memerlukan adanya instrumen penelitian guna mengumpulkan dan memperoleh data yang diperlukan. Menurut Ali (1997:35) “berdasarkan jenis perolehannya data terdiri dari data sekunder dan data primer”. Dikatakan Ali (1997:35) “data sekunder adalah data yang tersedia dan diperoleh sebagai hasil pengolahan data primer atau data menyangkut keadaan sesungguhnya dari sesuatu kondisi. Sedangkan data primer adalah data pokok yang diperoleh melalui alat pengumpul data seperti wawancara, angket dan observasi”. Sehubungan dengan hal tersebut, instrumen penelitian yang dipergunakan adalah.

1. Pedoman Wawancara, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar pertanyaan tentang hal-hal yang ditanya dan akan dikembangkan di lapangan kepada subjek penelitian.
2. Pedoman Observasi (Catatan Lapangan), yaitu catatan observasi yang dipersiapkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian akan menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Observasi atau pengamatan Pengumpulan

Data penelitian ini akan dilakukan melalui kegiatan observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek analisis untuk menggali aspek-aspek yang relevan dan penting sebagai dasar analisis dan interpretasi yang akan dilakukan. Pengamatan di lapangan ini bertujuan untuk menggali kemungkinan adanya informasi yang terlewatkan dari pedoman wawancara yang dilakukan dan berupaya memperkaya dimensi pengamatan dari fenomena analisis yang ada. Selain melakukan pengamatan juga diadakan pengumpulan data dan mendeskripsikan atau menggambarkan tentang keberhasilan implementasi kebijakan Program BOS. disamping dilakukan pengamatan, informasi maupun data yang mendalam tentang faktor-faktor pendukung, faktor penghambat, dampaknya bagi Pelaksanaan Program BOS di lembaga Pendidikan Dasar.

2. Wawancara

Penelitian ini agar dapat memperoleh data yang valid atau akurat disamping observasi, pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif serta beberapa keterangan atau informasi dari informan. Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap nara sumber (*key informan*) yang dianggap memiliki

pengetahuan yang memadai tentang suatu persoalan atau fenomena pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sedang diamati yaitu SMP Negeri di Kabupaten Sintang. Dalam kegiatan wawancara mendalam (*in depth interview*) dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif serta beberapa keterangan atau informasi dari informan. Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap nara sumber (*key informan*) yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang suatu persoalan atau fenomena terhadap obyek yang sedang diamati yaitu pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Sintang. Adapun pihak-pihak yang akan menjadi target wawancara meliputi :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang (Kepala Subdin yang menagnai Program BOS)
2. Tim Pelaksana Program bantuan dana BOS Kabupaten Sintang.
3. Tenaga Pendidik atau Guru SMP Negeri di Kabupaten Sintang.
4. Peserta didik SMP negeri selaku penerima bantuan BOS di Kabupaten Sintang
5. Pihak-pihak lain yang dinilai relevan dan dibutuhkan atau ditemukan saat penelitian dilakukan.

Dokumentasi Penggunaan dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen resmi dari Lembaga/Organisasi yang telah melaksanakan Program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selaku pihak yang telah penerima dana bantuan BOS sebagai bukti-bukti fisik dari kegiatan yang telah diselenggarakan. Dokumen dimaksud mencakup surat-surat, data-data/informasi, catatan, foto-foto kegiatan, rekaman tape recorder dan lainnya yang relevan serta berkas laporan-laporan yang telah disusun berbagai pihak tentang obyek yang diteliti.

E. Metode Analisis Data

Sesuai dengan jenis penelitian, teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data secara mendalam dan objektif sehingga dapat diperoleh pemahaman dan kesimpulan yang tepat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu :

- a. Tahap pertama, reduksi data sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, klasifikasi data kasar dan hasil penggunaan teknik dan alat pengumpul data di lapangan sampai selesai pengumpulan data.

- b. Tahap kedua, penyajian data, yaitu dengan menyusun sekumpulan informasi menjadi pertanyaan yang disajikan dalam bentuk teks, mulanya terpecah dan terpisah menurut informasi saat diperoleh informasi itu, kemudian diklasifikasi menurut tema dan kebutuhan analisis.
- c. Tahap ketiga, menarik kesimpulan berdasarkan reduksi dan penyajian data yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam kesimpulan ini peneliti akan memberikan makna dari data-data yang sudah diperoleh.

Sehubungan dengan penelitian ini, maka analisis dilakukan dengan memberikan pemaknaan, penilaian serta gambaran terhadap implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sedang diamati yaitu SMP Negeri di Kabupaten Sintang.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan

Kabupaten Sintang adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Kalimantan Barat. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kabupaten Sintang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 32.279 km² dan berpenduduk sebesar ± 500.000 jiwa. Kepadatan penduduk 16 jiwa/km² yang terdiri dari multi etnis dengan mayoritas suku Dayak dan Melayu.

Daerah Pemerintahan Kabupaten Sintang pada tahun 2005 terbagi menjadi 14 kecamatan, 6 kelurahan dan 183 desa. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Ambalau dengan luas 29,52 persen dari total luas wilayah Kabupaten Sintang, sedangkan luas masing-masing kecamatan lainnya hanya berkisar 1–29 persen dari luas Kabupaten Sintang. Secara umum Kabupaten Sintang luasnya hampir menyamai luas Provinsi Sumatera Utara.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sintang merupakan perbukitan dengan luas sekitar 22.392 km² atau sekitar 69,37 persen dari luas Kabupaten Sintang (32.279 km²). Kabupaten Sintang merupakan kabupaten terbesar kedua di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu setelah Kabupaten Ketapang.

Suku Melayu yang tinggal banyak tinggal di pesisir dan tepi

sungai (Kapuas dan Melawi) adalah keturunan masyarakat kesultanan Sintang Islam. Sedangkan masyarakat Suku Dayak sejak dulu tinggal di daerah pedalaman dan hutan Sintang. Kehidupan mereka tergantung pada kemurahan alam di hutan. Masyarakat Dayak banyak menganut kepercayaan animisme dan kemudian sebagian beralih ke Kristen sejak masuknya misionaris dan zending ke pedalaman. Meski berada pada kubu yang berbeda, kedua suku tersebut dapat hidup berdampingan dengan damai. Topografi daerah Sintang dominan berupa perbukitan sehingga mengakibatkan sumber mata pencaharian utama penduduknya sebagian besar sebagai petani sawit dan karet. Pada tahun 1936 daerah Sintang dijadikan daerah *landschop* di bawah naungan pemerintahan *Gouvernement* pada masa pemerintahan Belanda.

Berdasarkan hasil registasi penduduk tahun 2012, jumlah penduduk Kabupaten Sintang tercatat sebesar 1.434.025 jiwa dengan pertumbuhan penduduk selama tahun 2011 sebesar 1.02%, kondisi tersebut memberi arti bahwa pembangunan kependudukan khususnya usaha untuk menurunkan jumlah kelahiran memberikan hasil yang nyata. Sekitar 73,99% penduduk Kabupaten Sintang berumur produktif (15 – 64 th) sehingga angka beban tanggungan yaitu perbandingan antara penduduk usia produktif dengan penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65th ke atas) pada tahun 2006 sebesar 35,18 yang berarti 100 orang penduduk usia produktif menanggung 35 orang penduduk usia tidak produktif.

Komposisi penduduk Kabupaten Sintang berdasarkan tingkat pendidikan sebanyak 139.278 orang berpendidikan Sekolah Dasar dan sebesar 64.304 orang berpendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama sedangkan sebesar 35.573 orang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau setingkat, sebesar 56.021 orang berpendidikan Akademi setingkat sarjana muda dan 58,138 orang berpendidikan tinggi atau Universitas. Untuk mengetahui secara detail gambaran penduduk Kabupaten Sintang berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel 4.1. Jumlah Siswa SMP Negeri Kabupaten Sintang Tahun 2011/2012

NO	KECAMATAN	SMP NEGERI
1	Sintang	2748
2	Tempunak	1137
3	Nanga Serawai	743
4	Sepauk	1500
5	Ketungau Tengah	832
6	Kayan Hilir	936
7	Dedai	1336
8	Sungai Tebelian	1063
9	Kayan Hulu	714
10	Binjai Hulu	414
11	Kelam Permai	842
12	Ambalau	580
13	Ketungau Hilir	745
14	Ketungau Hulu	823
	Jumlah	14.413

Sumber : diolah dari data BPS, 2012 Kabupaten Sintang

Pembangunan pada sektor Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesias yang cerdas dan trampil yang

diikuti oleh rasa percaya diri serta sikap inovatif, disamping itu merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang berlangsung seumur hidup dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Perkembangan tingkat partisipasi sekolah haruslah diimbangi dengan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai, untuk jelasnya lihat data sekolah berikut:

Tabel 4.2. Jumlah Sekolah SMP Negeri Kabupaten Sintang Tahun 2011/2012

NO	KECAMATAN	SMP NEGERI
1	Sintang	6
2	Tempunak	7
3	Nanga Serawai	4
4	Sepauk	8
5	Ketungau Tengah	4
6	Kayan Hilir	7
7	Dedai	6
8	Sungai Tebelian	5
9	Kayan Hulu	5
10	Binjai Hulu	2
11	Kelam Permai	5
12	Ambalau	3
13	Ketungau Hilir	4
14	Ketungau Hulu	6
	Jumlah	72

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 2012

Guna menunjang pembangunan Sumberdaya Manusia di Kabupaten Sintang bidang pendidikan menjadi perhatian yang cukup besar untuk keperluan ini Pemerintah Kabupaten Sintang bersama-sama dengan instansi terkait dan pihak swasta selalu memberikan dorongan dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Dorongan yang

ada, bukan hanya memberikan bantuan dan penyuluhan tetapi juga menumbuh kembangkan semangat membangun sarana prasarana dan infrastruktur pendidikan. Seperti halnya pembangunan sarana pendidikan dari seluruh jenjang pendidikan, hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang telah mempunyai komitmen memperhatikan kebutuhan penduduknya dalam bidang layanan pendidikan.

B. Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Sintang

a. Cakupan Dana

Bantuan Operasional Pendidikan (BOS) adalah sebuah kebijakan yang berbentuk jaminan sekolah gratis untuk jenjang pendidikan dasar. Jaminan ini berupa pemberian bantuan kepada semua siswa-siswi melalui penyelenggara wajib belajar 9 tahun atau yang disebut sekolah. BOS diadakan sebagai respon pemerintah terhadap tingginya disparitas partisipasi sekolah antar kelompok masyarakat. Untuk itulah, pemerintah mengeluarkan BOS, sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi tingginya disparitas partisipasi sekolah. Dengan adanya BOS diharapkan pada tahun 2006 APK rata-rata mampu mencapai 96% dengan tetap memperhitungkan pemerataan.

Cakupan dana BOS bagi anak didik keluarga miskin berdasarkan kajian hasil data siswa yang telah disusun oleh sekolah, RAPBS dan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan BOS SMP Negeri Kabupaten Sintang telah terungkap ternyata dari jumlah siswa/siswi keluarga miskin berkisar 20 % - 33% dari total siswa, dari total siswa miskin tersebut oleh sekolah belum dapat sepenuhnya memberikan layanan yang memadai dan akan dilakukan secara bertahap, hal ini dikarenakan terbatasnya sumber dana yang digunakan operasional sekolah. Sumber dana sekolah yang berasal dari orang tua/wali siswa, bantuan APBD Kabupaten Sintang maupun dari dana BOS belum dapat menjangkau memberikan layanan bagi siswa miskin berkisar secara keseluruhan, justru dengan program BOS sekolah agak bisa bernafas sehingga dapat memberikan kontribusi pengentasan kemiskinan bidang pendidikan sekitar 20 % - 25 %.

Hal ini juga diperkuat hasil wawancara dengan beberapa Kepala Sekolah bahwa meskipun dana BOS belum cukup untuk seluruh operasional sekolah, akan tetapi sudah sangat membantu kelancaran operasional sekolah, bagaimanapun kenyataan dana BOS memberikan kontribusi sekolah cukup besar jika dibandingkan dengan bantuan APBD yang relatif kecil. Bentuk layanan sekolah terhadap siswa dari keluarga miskin masih terbatas pada pemberian bea siswa (khusus) yaitu pembebasan biaya SPP (Rp. 55.000 – Rp. 60.000) dan Sumbangan BP.3 yang besarnya ditentukan oleh komite sekolah dan sampai sekarang

sekolah belum dapat melaksanakan program BOS sesuai dengan juklak yang ditetapkan, diantaranya sekolah belum dapat memikirkan bantuan transportasi bagi siswa keluarga miskin karena terbatasnya dana yang tersedia untuk operasional oleh sekolah.

b. Ketepatan Sasaran

Sebuah program, khususnya program pemerintah merupakan sebuah upaya yang ditujukan untuk memperbaiki sesuatu yang telah ada atau menumbuhkan sesuatu yang belum ada menuju taraf yang lebih baik. Dalam suatu program yang dicanangkan pemerintah tentunya harus memiliki kejelasan dari sasaran program tersebut sehingga jelas output dan outcome yang hendak dicapai. Pendefinisian sasaran perlu agar program yang berjalan tidak sekedar rutinitas program yang tidak mempunyai manfaat yang sebanding dengan sumberdaya (*resources*) yang dikeluarkan. Sebuah program yang bersentuhan dengan kepentingan publik harus mempunyai sasaran yang jelas, agar program yang dijalankan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal inilah yang kemudian menjadikan tepat sasaran sebagai salah satu indikator dari akuntabilitas sebuah program.

Adapun sasaran suatu program dapat berupa individu ataupun kelompok yang telah ditentukan sebelumnya. Di dalam penelitian ini, sasaran program BOS adalah SD/SDLB/MI /Sekolah Keagamaan non Islam setara SD dan SMP/SMPLB/MTs/, Sekolah Keagamaan non Islam setara SMP yang berada di wilayah Kabupaten. Setelah sasaran program

ditentukan, maka pelaksanaan program harus tepat sasaran. Hal ini dimaksudkan agar sumberdaya program tidak terbuang sia-sia dan dapat dinikmati oleh mayoritas sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat cakupan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi siswa dan siswi dari keluarga miskin di SMP Negeri Kabupaten Sintang dapat dijelaskan bahwa Jumlah Siswa Miskin SMP. Negeri Kabupaten Sintang Yang Terlayani Dana BOS Tahun 2011/2012 adalah 7.506 siswa, dari jumlah tersebut siswa miskin yang sudah mendapatkan layanan dana BOS adalah 6.483 siswa atau (75%) sedangkan jumlah siswa miskin yang belum mendapatkan layanan adalah 4.529 siswa atau (25 %). Selain cakupan siswa miskin yang terhitung belum seluruhnya mendapatkan pelayanan pendidikan secara memadai, juga bantuan khusus bagi siswa miskin belum semua sekolah dapat merealisasikan. Contoh dari 72 SMP Negeri Kabupaten Sintang belum ada yang memberikan bantuan uang saku atau transport bagi siswa miskin.

Pada hal jumlah tersebut tiap tahun akan mengalami kenaikan hal ini dapat terealisasi karena adanya program BOS disisi lain sekolah menerapkan manajemen Subsidi silang bagi orang tua murid yang mampu untuk membantu mengangkat bagi siswa kurang mampu/miskin. Dengan demikian diharapkan program BOS akan benar-benar dapat memberikan akses yang luas bagi siswa dari keluarga miskin maupun siswa yang tidak mampu untuk dapat menyelesaikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar

sembilan Tahun secara berkualitas.

Berdasarkan kajian data siswa yang disusun oleh sekolah, telah ditemukan atau terungkap masih adanya siswa/siswi dari keluarga tidak mampu yang belum memperoleh layanan pendidikan dasar secara memadai. Hasil kajian dari total siswa 14,385 anak ternyata terdapat sekitar 45% atau 6,483 siswa keluarga tidak mampu, dari jumlah 6,483 anak tersebut ternyata baru 4,529 anak yang sudah memperoleh layanan atau sekitar 66% sedangkan sisanya 1,954 anak atau sekitar 43% belum mendapatkan layanan pendidikan dasar dengan memadai.

Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 4 Kabupaten Sintang yang menjadi responden dalam penelitian ini, memberikan tanggapan bahwa program BOS ternyata dapat membebaskan biaya pendidikan bagi siswa/siswi yang tidak mampu. Hasil penelitian ini juga diperkuat hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan yang merangkap sebagai Ketua Tim Manajemen BOS Kabupaten Sintang bahwa program BOS jika implemetasinya dilaksanakan dengan konsisten dan komitmen sesuai dengan Buku Panduan BOS ketentuan akan dapat membebaskan biaya pendidikan bagi siswa/siswi tidak mampu atau miskin. Pernyataan Kepala Dinas atau Ketua Tim Manajemen BOS tersebut telah dipertajam hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 yang memperkuat bahwa pelaksanaan program BOS yang selama ini sudah dilaksanakan ternyata dapat meringankan bagi siswa/siswa yang

tidak mampu hanya saat ini belum dapat menjangkau secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian dokumentasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun 2011 dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Sekolah tahun 2011 diantaranya SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP Negeri 3 dan SMP Negeri 4 Kabupaten Sintang yang menjadi sampel penelitian, dari dokumentasi tersebut setelah kami lakukan kajian ternyata masing-masing sekolah tersebut sudah mampu membebaskan bagi siswa/siswi yang tidak mampu/miskin. Dari keempat SMP Negeri 2 yang menjadi sampel tersebut mempunyai potensi anggaran untuk membebaskan siswa/siswi tidak mampu/miskin yang bervariasi yaitu antara 15 % - 20 % dari jumlah siswa yang ada atau berkisar rata-rata 200 siswa tiap sekolah.

Total siswa tidak mampu yang tersebar di seluruh SMP Negeri Kabupaten Sintang sebanyak 2748 siswa dan yang telah mendapatkan layanan pendidikan dasar baru sebanyak 380 anak. Dari jumlah tersebut kemungkinan untuk tahun yang akan datang akan mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang terus mengalami penurunan akibat kenaikan BBM.

Upaya sekolah untuk tetap dapat memberikan layanan pendidikan secara memadai, selain dukungan dana BOS, sekolah telah menerapkan Manajemen Subsidi Silang. Artinya bagi orang tua murid yang mampu untuk membantu mengangkat bagi siswa miskin/kurang mampu. Hal ini

dilakukan karena dana BOS dan bantuan APBD yang diberikan kepada sekolah tidak mencukupi untuk operasional sekolah.

Guna mengatasi permasalahan dana tersebut peran serta orang tua/wali murid tetap diharapkan yang diwujudkan dalam bentuk sumbangan SPP maupun sumbangan BP.3. Meskipun demikian berdasarkan wawancara dengan beberapa Kepala Sekolah SMP Negeri, yang menyatakan bahwa dana BOS yang diterima oleh sekolah cukup dominan dalam memberikan akses yang luas bagi keluarga kurang mampu dalam menyelesaikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan Tahun secara berkualitas. Hal ini dibuktikan adanya kajian dokumen laporan pertanggung jawaban keuangan BOS ternyata dana BOS telah memberikan andil yang sangat besar terhadap pendidikan di daerah dalam mendukung siswa tidak mampu.

c. Penerapan Skala Prioritas Dalam Penggunaan Dana

Minimnya pendanaan program yang dilaksanakan oleh pemerintah di sektor pendidikan perlu disiasati. Langkah konkret yang harus dilaksanakan adalah dengan mengalokasikan dana berdasarkan skala prioritas. Skala prioritas didasarkan pada urutan tingkat prioritas mulai dari hal yang mendesak sampai pada perhitungan yang sifatnya untung rugi. Hal ini perlu dilakukan agar sumberdaya (*resources*) program yang minimal dapat menutupi kebutuhan sektor pendidikan secara berkala, sehingga lebih memberikan manfaat yang maksimal.

Kajian terhadap akuntabilitas program BOS agar memenuhi ukuran akuntabilitas maka harus diukur tingkat skala prioritas di dalam penggunaan dananya. Pengukuran skala prioritas dimulai dari penggunaan dana sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak), identifikasi alternatif pilihan, dan penghematan dana. Ketiga langkah tersebut harus diperhatikan secara seksama oleh pelaksana program dalam hal ini sekolah sebagai pihak pertama yang paling mengerti kebutuhan sekolah tersebut.

Dalam aturan BOS penyelenggaraan program BOS tidak secara tegas ditentukan apakah BOS untuk subsidi umum atau subsidi khusus yang diarahkan untuk siswa miskin. Hasil kajian memperlihatkan bahwa dalam pelaksanaannya BOS cenderung diperlakukan sebagai subsidi umum untuk membiayai kegiatan operasional sekolah dan semua murid menerima manfaat program BOS. Secara konseptual, sekolah memegang kunci dalam penentuan penggunaan BOS termasuk dalam kebijakan pemberian bantuan khusus untuk siswa miskin.

Berdasarkan ketentuan (panduan BOS) dana BOS di kelola oleh Kepala Sekolah, Guru/tenaga administrasi. Uang dikirim langsung ke nomor rekening sekolah oleh BRI sebagai lembaga penyalur yang ditentukan Tim Manajemen Provinsi. Sekolah boleh menggunakan BOS tersebut dengan berbagai jenis kegiatan berdasarkan RAPBS yang disusun oleh sekolah dan komite sekolah, RAPBS sebagai persyaratan untuk menerima BOS harus mendapat persetujuan Ketua Komite Sekolah.

Hasil kajian yang dilaksanakan oleh peneliti memperlihatkan betapa besar dominasi Kepala Sekolah dalam penyusunan RAPBS maupun dalam pengelolaan dana BOS hal ini terjadi hampir seluruh sekolah. Guru dan orang tua wali murid hampir tidak pernah diajak dalam proses penyusunan RAPBS, sedangkan Komite sekolah umumnya hanya ikut menandatangani RAPBS yang telah disusun sekolah. Hal yang demikian inilah menjadikan fungsi kontrol belum dapat berjalan secara efektif.

Berdasarkan hasil kajian dari Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BOS dari 72 SMP Negeri hampir sebagian besar dana BOS dimanfaatkan untuk kegiatan, membayar tenaga honorer, GTT, PTT dan Tenaga Harlep, Belanja barang dan jasa, Kegiatan Belajar mengajar, Kegiatan Kesiswaan, Kegiatan Pemeliharaan. Dari komponen tersebut pos yang paling besar adalah (30%) untuk pembayaran tenaga honorer /GTT/ PTT, Tenaga Harlep, (25%) untuk belanja barang jasa dan (20%) untuk kegiatan belajar mengajar, (15%) kegiatan kesiswaan dan (10%) dan pemeliharaan gedung.

Untuk mengetahui perincian pemanfaatan dana BOS oleh Sekolah disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3. Tingkat Prosentase Penggunaan Dana Bos SMP Negeri Kabupaten Sintang Tahun 2011/2012

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH (Dalam rupiah)	KETERANGAN
1	Belanja Pegawai	3.515.432.400	Pembayaran tenaga Honorer, GTT, PTT dan Tenaga Harlep
2	Belanja Barang dan Jasa	2.929.527.000	ATK, bayar telepon, listrik, penggunaan dll.
3	Kegiatan Belajar mengajar	2.343.621.600	Tes smester, Membuat soal ujian, Ujian akhir smester, remedial dll.
4	Kegiatan kesiswaan	1.757.716.200	Kegiatan Osis, Kegiatan kesiswaan, Lomba, pramuka dll.
5	Kegiatan pemeliharaan gedung	1.171.810.800	Rehab gedung, Perbaikan kamar mandi/wc, lapangan Basket dll.
	JUMLAH	11. 718.108.000	

Sumber : diolah dari Laporan Pertanggungjawaban BOS, 2011/2012

Berdasarkan tabel tersebut di atas, memperlihatkan bahwa pemanfaatan dana BOS oleh 72 sekolah SMP Negeri Kabupaten Sintang ternyata sebagian besar bantuan BOS digunakan untuk membayar tenaga honorer guru/GTT/PTT/Harlep dan urutan kedua adalah untuk pembelian barang dan jasa sedangkan yang ketiga adalah kegiatan belajar mengajar. Sekolah belum sepenuhnya menggunakan dana BOS sesuai dengan juklak karena secara riil dilaporkan masih dana BOS yang digunakan seperti Pemberian transportasi siswa miskin belum dilaksanakan, Untuk transportasi lomba guru, Untuk bayar tenaga harlep yang sudah dibiayai PEMDA, Penerimaan Murid masih dikenakan berbagai pungutan dengan berbagai alasan seperti (stopmap Rp.5000,-), Rehab gedung, Pembelian peralatan yang tidak terkait dengan proses pendidikan komputer, Perbaikan

Pagar depan sekolah yang seharusnya hal ini tidak boleh terjadi.

d. Sistem Pengawasan

Indikator selanjutnya di dalam mengukur tingkat akuntabilitas program BOS adalah sistem kontrol yang ketat terhadap program ini mulai dari sosialisasi sampai pada tahap pelaksanaan. Menurut Sujamto (1983:19) “pengawasan berasal dari kata “awas” yang berarti “mampu mengetahui secara cermat dan seksama”. Dari pengertian tersebut, menurut Siagian, (dalam Sujamto, 1983:14) “pengawasan, adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya”. Menurut Sarwoto (dalam Sujamto, 1983:16), “pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang dikehendaki”. Sedangkan menurut Manullang (dalam Sujamto, 1983:18), “pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilai dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan dengan rencana semula”.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa pengawasan adalah “salah satu fungsi manajemen untuk memberikan umpan balik (*feed back*) terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan” (Siagian, 1988:23). Artinya adalah pengawasan merupakan segala usaha

atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan dengan yang semestinya atau tidak. Menurut Pusdiklat BPKP (2000:6) hasil pengawasan harus dijadikan masukan oleh pimpinan dalam mengambil keputusan untuk :

1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidaktertiban.
2. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidaktertiban.
3. Mencari Cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik untuk mencapai tujuan dan melaksanakan tugas-tugas organisasi.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas implementasi programn BOS, system pengawasan diperlukan agar menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidaktertiban, mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidaktertiban serta mencari Cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik untuk mencapai tujuan dan sasaran dari program BOS itu sendiri. Media kontrol yang digunakan yaitu masyarakat, media massa, dan lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah seperti Bawasda, LSM dan sebagainya. Adapun aspek yang perlu dikontrol adalah penggunaan dana BOS. Hal ini bertujuan agar dana BOS tidak diselewengkan oleh

pihak-pihak tertentu yang bertujuan untuk menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi, sehingga akan berdampak pada berkurangnya nilai manfaat program. Independensi media kontrol juga harus diperhitungkan agar kontrol yang dilaksanakan lebih maksimal dan lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang mengatakan bahwa Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan sebuah program yang sangat fundamental bagi kelangsungan pendidikan di Kabupaten Sintang, khususnya pendidikan dasar. Mengingat besarnya manfaat program ini, sebaiknya program ini mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Berkaitan dengan hal tersebut menurut Tokoh Masyarakat sebagai anggota komite sekolah bahwa Pemerintah sebagai penyelenggara program, hendaknya telah mempersiapkan mekanisme yang matang sehingga program ini dapat berjalan lancar. Begitu juga dengan masyarakat yang berperan sebagai penerima program hendaknya ikut terlibat aktif di dalamnya. Hal ini dapat membantu jalannya program secara keseluruhan. Tidak terkecuali program BOS yang dilaksanakan di jenjang pendidikan SMP.

Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat sebagai anggota komite sekolah, Program BOS yang dilaksanakan di kabupaten Sintang sama halnya yang dilaksanakan di daerah lain. Program ini harus mendapat perhatian serius dari setiap elemen agar manfaat program dapat maksimal.

Salah satu bentuk perhatian tersebut berupa kontrol yang ketat terhadap pelaksanaan program ini. Kontrol bukan hanya dilakukan oleh pemerintah maupun badan independen yang ditunjuk mengurus program ini, namun masyarakat juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih berarti melalui kontrol ini.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang media kontrol yang tersedia meliputi media pemerintah dan media massa. Kontrol atau pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh lembaga di luar pengelola program (monev eksternal). Sementara itu, media kontrol pemerintah yang tersedia di dalam proses pengawasan program BOS di kabupaten Sintang dapat dikategorikan ke dalam 4 (empat) macam yaitu:

Tabel 4.4. Media Pengawasan Dalam pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri di Kabupaten Sintang Tahun 2012

No	Media Pengawasan	Keterangan
1	Tim monitoring independen: Perguruan Tinggi, DPR, BIN, atau Tim monitoring Khusus yang ditunjuk oleh pemerintah	Untuk DPRD Kabupaten Sintang cukup aktif
2	Unsur masyarakat dari unsur dewan pendidikan, LSM, BMPS, maupun organisasi masyarakat/ kependidikan lainnya	Cukup aktif
3	Instansi pengawas, BPK, BPKP, Inspektorat Jendral dan Bawasda Propinsi dan Kabupaten/Kota	Kurang aktif
4	Unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah/madrasah, kabupaten/kota, propinsi dan pusat	Kurang aktif

Sumber: Data lapangan diolah, 2013.

Menurut hasil wawancara dengan Inspektur Kabupaten Sintang, Dana BOS secara khusus belum pernah diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Sintang, audit Dana BOS pernah dilakukan dalam bentuk Join Audit dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2009 dengan mengambil beberapa sampel, Secara khusus dana BOS telah dilakukan audit oleh BPKP dan BPK

Kontrol atau pengawasan terhadap jalannya program BOS ini di dalam realitanya masih jauh dari harapan. Hal ini dapat dilihat dari 5 (lima) komponen utama yang dimonitor masih banyak mengalami kendala. Kelima komponen utama tersebut adalah: Alokasi dana sekolah penerima BOS, Penyaluran dan penyerapan dana BOS, Pelayanan dan pengaduan, Administrasi keuangan, dan Pelaporan.

Menurut hasil wawancara dengan Inspektur Kabupaten Sintang, terdapat beberapa sekolah dengan sengaja menambah jumlah siswa agar sekolah mendapatkan dana lebih yang nantinya dapat digunakan untuk kepentingan sekolahnya ataupun kepentingan lain. Sementara itu, penyaluran dan penyerapan dana BOS juga tidak berjalan lancar. Hal ini terindikasikan melalui banyaknya pos pembiayaan yang fiktif dan adanya pos pembiayaan baru yang menyalahi aturan. Hal ini dilakukan sekolah dengan harapan mendapatkan dana lebih agar dapat digunakan untuk kepentingan pribadi. Kekeliruan ini secara tidak langsung telah

mengurangi nilai manfaat program, sehingga dampak yang dirasakan tidak seperti yang diharapkan.

Menurut hasil wawancara dengan Inspektur Kabupaten Sintang, untuk administrasi keuangan permasalahan awal yang muncul adalah minimnya pengetahuan SDM terhadap mekanisme administrasi keuangan yang meliputi pajak, denda dan sebagainya. Hal ini dikarenakan mekanisme ini masih terbilang awam di kalangan pihak sekolah yang sebelumnya tidak pernah ditemuinya. Setidaknya untuk mengatasi masalah ini dibutuhkan waktu adaptasi bagi SDM untuk mengelola mekanisme administrasi yang rapi.

Menurut hasil wawancara dengan Inspektur Kabupaten Sintang, pelaporan yang seharusnya dilakukan sekolah masih belum maksimal. Hal ini terindikasikan melalui pelaporan yang masih mengalami keterlambatan dari *deadline* yang seharusnya, dan penemuan pelaporan palsu terkait dengan adanya pembiayaan fiktif di sekolah yang menggunakan dana BOS ini.

Menurut hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat sebagai anggota komite sekolah, masyarakat sebagai pihak yang paling di utungkan dari program ini juga diharuskan melakukan pengawasan program ini. Namun di dalam kenyataannya, peran masyarakat di dalam setiap proses khususnya proses pengawasan masih belum maksimal. Ketika sekolah menarik biaya yang tidak semstinya, sebaiknya masyarakat melaporkan hal

ini ke dinas atau bawasda sehingga biaya tersebut dapat diusut kebenarannya. Namun hal ini belum juga nampak pada masyarakat khususnya orang tua murid.

Menurut hasil wawancara dengan Inspektur Kabupaten Sintang,, bentuk konkret dari kontrol yang dilakukan adalah temuan kasus yang terjadi di dalam pelaksanaan program BOS ini. Data dari dinas pendidikan nasional menyebutkan bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh komponen monitoring dan evaluasi dapat disimpulkan ke dalam beberapa hal yaitu:

1. Masih banyak sekolah yang belum tertib Administrasi dalam mengelola dana BOS
2. Adanya pajak yang belum dibayarkan
3. Ada beberapa Sekolah yang memakai dana BOS tidak sesuai dengan peruntukannya
4. Belum maksimalnya laporan penggunaan dana BOS dan banyaknya temuan dari Tim BPKP
5. Transparansi Kepala Sekolah dalam mengelola dana BOS masih rendah
6. Pungutan oleh Sekolah dalam rangka PSB dan kegiatan lain marak kembali
7. Banyaknya Sekolah yang mengeluh karena pengawasan yang berlebihan

8. Masih banyak Sekolah yang belum sesuai dalam membuat laporan. Ada beberapa sekolah yang dalam menggunakan Dana BOS belum sesuai juklak yang ada

Menurut hasil wawancara dengan Inspektur Kabupaten Sintang, di dalam juklak program BOS juga telah disinggung mengenai mekanisme sanksi yang diberikan, ketika seorang pegawai melakukan kekeliruan. Mekanisme sanksi yang dikenakan di dalam program BOS ini dapat berupa :

- a. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja)
- b. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.
- c. Penerapan proses hukum.
- d. Pemblokiran dana untuk penyaluran dana periode berikutnya dan penghentian sementara seluruh bantuan pada tahun berikutnya kepada Kabupaten/kota dan Propinsi, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok atau golongan.

Namun di dalam kenyataannya, mekanisme sanksi seperti ini belum dilaksanakan sepenuhnya. Begitu juga yang terjadi pada pelaksanaan program BOS di Kabupaten Sintang. Pelaksanaan program yang masih banyak terjadi kekeliruan belum disikapi serius oleh

pemerintah dengan menegakkan aturan secara tegas. Longgarnya pengawasan juga menjadi latar belakang maraknya kekeliruan ini. Kebanyakan kekeliruan dilakukan oleh oknum sekolah.

Secara umum program ini sudah berjalan semestinya, hal ini dilihat dari mayoritas sasaran program ini sudah tersentuh program ini, meskipun alokasi dana program masih harus mendapat pengawasan yang lebih ketat agar lebih memberikan manfaat yang maksimal. Sementara itu, maraknya penyelewengan yang dilakukan oleh oknum di sekolah merupakan bukti masih longgarnya fungsi kontrol yang diterapkan di dalam program ini. Hal inilah yang akan mengurangi nilai akuntabilitas karena akuntabilitas juga dapat dilihat dari pelaksanaan kontrol terhadap program BOS ini.

e. Manfaat Program

Menurut Islamy (1998:15) "Kebijakan adalah suatu program kegiatan yang dipilih oleh seseorang atau kelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai tujuan tertentu". Selanjutnya menurut Anderson (dalam Islamy, 1998: 17) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Dan menurut Friedrich (dalam Winarno, 2002:15) juga berpendapat bahwa "Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan

oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu”.

Hasil kajian dokumen laporan pertanggung jawaban keuangan BOS ternyata dana BOS telah memberikan andil yang sangat besar terhadap pendidikan di daerah, berdasarkan hasil kajian laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan BOS dari 10 sekolah sampel, ternyata dana BOS menopang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) rata-rata 25% - 30% dari jumlah rencana anggaran pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan oleh sekolah untuk lebih jelas lihat (tabel V.1 realisasi anggaran halaman 81) tersebut di atas. Hal tersebut di atas dapat diperkuat hasil survei tentang kontribusi BOS terhadap siswa/siswi miskin atau tidak mampu yang disajikan tabel berikut :

Tabel 4.5. Kontribusi Program BOS Terhadap Siswa/Siswi Kurang Mampu/Miskin

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	a. sangat membantu	10	33,3
2	b. membantu	13	43,4
3	c. cukup membantu	7	23,3
4	d. kurang membantu	-	-
5	e. tidak membantu	-	-
	Jumlah	30	100

Sumber: Di olah dari pertanyaan no.9

Berdasarkan tabel tersebut di atas menggambarkan dari 30 responden, sebagian besar yaitu 13 reponden atau (43,3%) menyatakan bahwa program BOS ternyata membantu meringankan beban siswa/siswi kurang mampu, sedangkan urutan kedua 10 responden atau (33,%)

menyatakan bahwa program sangat membantu bagi siswa/siswi kurang mampu, sisanya 7 responden menyatakan bahwa program cukup membantu siswa/siswi kurang mampu. Dengan memperhatikan dominasi jawaban tersebut telah dapat kami simpulkan bahwa program BOS oleh sekolah sangat membantu bagi keluarga siswa/siswi kurang mampu/miskin. Hal ini diperkuat hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMP. Negeri 2 Sintang dari jumlah siswa 111 orang sebanyak 55 siswa atau mencapai berkisar 50% dari jumlah siswa yang diberikan beasiswa dalam bentuk dibebaskan dari segala biaya seperti, uang bantuan gedung, SPP terkecuali biaya untuk rencana tour sekolah yang dinikmati oleh anak itu sendiri.

Salah satu tujuan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu agar mereka dapat memperoleh layanan Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu. Sesuai dengan tujuan program BOS setelah pada sub.bab tersebut di atas telah memaparkan hasil kajian cakupan dana BOS bagi anak didik dari keluarga miskin selanjutnya pada sub.bab ini akan disajikan hasil penelitian tingkat cakupan dana BOS bagi anak didik keluarga yang tidak mampu. Setelah pada sub.bab di atas kita mencermati tingkat cakupan dana BOS Bagi siswa siswi dari keluarga miskin di Kabupaten Sintang pada SMP Negeri, sesuai arah dan tujuan dana BOS kajian penelitian selanjutnya adalah untuk mengetahui seberapa

besar cakupan dana BOS bagi siswa untuk keluarga tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar.

Adapun dampak pelaksanaan BOS ternyata bagi sekolah sangat positif, untuk mengetahui dampak program BOS peneliti melakukan pengumpulan data kuantitatif hasilnya secara umum bahwa BOS dapat memperkuat kemampuan sekolah dalam memberikan materi pembelajaran dan kegiatan tambahan kepada siswa dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Dari 72 SMP Negeri yang menjadi sampel menyatakan bahwa, dana BOS meningkatkan jumlah penerimaan dana sekolah, bagi yang muridnya banyak jumlah penerimaan sangat signifikan, meskipun penambahan penerimaan tiap sekolah berbeda. Dalam banyak hal BOS mengurangi keterbatasan anggaran sekolah dan dengan demikian dapat meningkatkan kapasitas sekolah untuk memenuhi biaya operasional sekolah. Oleh karena itu beberapa komponen yang semula dibebankan orang tua siswa melalui SPP menjadi berkurang, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa dampak program ternyata dapat mengurangi beban biaya bagi orang tua / wali murid.

Sedangkan dampak yang dirasakan oleh sekolah dengan adanya program BOS antara lain ; adanya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana pendidikan hal ini akan dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar siswa, dampak yang dirasakan oleh siswa adalah adanya beban biaya sekolah menjadi lebih berkurang, seperti di Sintang secara

umum untuk biaya SPP tiap anak sebelum ada program BOS rata-rata berkisar Rp. 90.000,- setelah adanya BOS berkurang menjadi Rp. 55.000,-sehingga mengurangi beban biaya tiap siswa Rp. 35.000,- atau berkisar 30% - 35%. Sedangkan dampak lain adalah dengan adanya program BOS, alokasi sekolah untuk bantuan khusus bagi siswa miskin atau tidak mampu cukup besar yakni berkisar rata-rata 15 % - 20 % dari jumlah siswa keseluruhan. Berdasarkan hasil evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BOS dari sekolah yang menjadi sampel dan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMP. Negeri 2 Sintang yang menyatakan bahwa mulai tahun ajaran 2011 / 2012 Sekolah mengalokasikan bantuan khusus bagi siswa tidak/kurang mampu berkisar 20% dari jumlah siswa sebanyak 111 anak yaitu sebanyak 55 anak tidak/kurang mampu yang diberikan dalam bentuk bea siswa bebas dari segala biaya sekolah (gratis, kecuali biaya tour/wisata siswa.). Dari jumlah tersebut tiap tahun akan mengalami kenaikan hal ini dapat terealisasi karena adanya program BOS disisi lain sekolah menerapkan manajemen Subsidi silang bagi orang tua murid yang mampu untuk membantu mengangkat bagi siswa kurang mampu/miskin. Dengan demikian diharapkan program BOS akan benar-benar dapat memberikan akses yang luas bagi keluarga kurang tidak mampu sehingga dapat menyelesaikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan Tahun secara berkualitas.

Hasil kajian dokumen laporan pertanggung jawaban keuangan BOS ternyata dana BOS telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap pendidikan di daerah, berdasarkan hasil kajian laporan pertanggung jawaban pelaksanaan BOS dari 10 sekolah sampel, ternyata dana BOS menopang RAPBS rata-rata 25% - 30% dari jumlah rencana anggaran pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan oleh sekolah. Karena untuk RAPBS SMP. Negeri Kabupaten Sintang rata-rata sekitar 300 juta s/d 400 juta. Untuk biaya pendidikan per-siswa idealnya berkisar Rp. 90.000 – Rp. 100.000 tiap bulan. Sebagai bukti BOS mempunyai dampak terhadap sekolah hal ini diperkuat dari hasil suvei terhadap responden tentang tingkat manfaat / daya dukung BOS dapat kita lihat tabel berikut ini :

Tabel 4.6. Tingkat Daya Dukung Program BOS Terhadap Sekolah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	a. sangat mendukung	18	60
2	b. Mendukung	10	33,3
3	c. cukup mendukung	2	6,7
4	d. kurang mendukung	-	-
	e. tidak memadai	-	-
5	Jumlah	30	100

Sumber: Di olah dari pertanyaan no.2

Atas dasar tabel di atas, menunjukkan bahwa dari 72 SMP Negeri yang menjadi responden dalam penelitian ini, terungkap bahwa sebagian besar yaitu 18 responden atau (60%) menyatakan bahwa

program BOS sangat mendukung untuk kegiatan pendidikan sekolah selanjutnya untuk 10 responden atau (33,3%) menyatakan setuju dan sisanya 2 responden atau (6,7%) menyatakan cukup setuju.

Meskipun dilihat jawaban responden tersebut bervariasi akan tetapi dapat kita simpulkan ternyata program BOS sangat mendukung keuangan sekolah, dengan demikian diharapkan kegiatan belajar mengajar siswa akan dapat lebih meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Selain itu ternyata program BOS mempunyai korelasi yang signifikan terhadap peningkatan intensitas kegiatan anak didik di sekolah. Untuk mengetahui tingkat intensitas kegiatan siswa yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7. Tingkat Intensitas Kegiatan Anak Didik Disekolah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	a. sangat menunjang	15	50,0
2	b. menunjang	10	33,3
3	c. cukup menunjang	5	16,7
4	d. kurang menunjang	-	-
5	e. tidak menunjang	-	-
	Jumlah	30	100

Sumber: di olah dari pertanyaan no.3

Menurut tabel di atas, mengindikasikan bahwa dari 72 SMP Negeri yang menjadi responden dalam penelitian ini, telah terungkap sebagian besar yaitu 15 reponden atau (50%) memberikan alternatif jawaban sangat menunjang, artinya program BOS dapat meningkatkan intensitas kegiatan belajar mengajar, sedangkan sebagian responden 10 responden atau (33,3%) menyatakan menunjang dan sisanya 5 responden

atau (16,7%) menyatakan cukup menunjang. Dari jawaban responden beragam, akan tetapi meskipun demikian jawaban dapat kita simpulkan bahwa kenyataan dilapangan program BOS dapat meningkatkan intensitas kegiatan belajar maupun kegiatan ekstra kurikuler sekolah. Indikator output juga dapat dilihat dari kemampuan sekolah untuk meringankan beban anggaran sekolah yang selama ini dirasakan jauh dari kecukupan .

Meskipun belum semua siswa miskin maupun siswa tidak mampu dapat memperoleh layanan pendidikan secara memadai yang berasal dari dana BOS, akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua siswa, termasuk siswa miskin maupun siswa tidak mampu mendapat manfaat dari dana BOS, diantaranya dalam bentuk pembebasan uang SPP berkisar Rp. 55.000,- bagi siswa miskin dan siswa tidak mampu mendapatkan pengurangan 50% dari besarnya iuran sekolah atau SPP. Oleh karena cakupan program BOS lebih luas dan merata, dan semua siswa terutama siswa miskin / tidak mampu dipastikan akan menerima manfaatnya. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa karena besarnya/luasnya cakupan sasaran Program BOS dan kecenderungan adanya kepastian bahwa siswa miskin akan mendapatkan manfaat berupa biaya sekolah akan lebih murah. Hal ini juga dipekuat hasil wawancara dengan beberapa Kepala Sekolah yang diperkuat dengan pernyataan orang tua siswa yang anaknya menerima BOS meskipun semua siswa menerima

manfaat Program BOS, akan lebih tepat jika sekolah memberikan manfaat tambahan bagi siswa miskin. Meskipun BOS sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin, akan tetapi sekolah belum melaksanakan mekanisme penentuan siswa miskin secara transparan. Selama sekolah hanya berdasarkan surat keterangan dari ketua RT, RW yang sahkan pihak kelurahan. Akan lebih transparan dan tepat sasaran apabila sekolah melakukan mekanisme penentuan siswa miskin dilakukan dengan pengisian formulir data pekerjaan yang mencakup penghasilan orang tua, selanjutnya dilakukan kunjungan ke rumah orang tua siswa yang di duga miskin (home visit) untuk verifikasi oleh tim kecil yang dibentuk oleh sekolah. Hasil verifikasi dapat digolongkan menjadi 2 katagori yakni : siswa tergolong miskin 100% dan siswa tergolong agak miskin dengan bantuan 50%. Sehingga terlihat bahwa BOS untuk meningkatkan akses pendidikan bagi siswa miskin atau bagi anak usia sekolah yang berasal dari rumah tangga miskin.

Hasil kajian dokumen Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2011 dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) tahun 2011 Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Sintang tersebut di atas, memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa Jumlah anggaran yang terserap untuk bidang Pendidikan, sumber dana berasal dari BOS sebesar Rp.21,392,320,458.

Berdasarkan data di atas maka dana BOS telah dapat memberikan kontribusi terhadap dana pendidikan. Dengan demikian telah dapat kita simpulkan bahwa BOS ternyata telah memberikan kontribusi pendidikan yang cukup signifikan, sehingga keberadaan program ternyata dapat mengurangi beban orang tua wali murid.

2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Sintang

a. Komunikasi

Menurut Edwards III (dalam Subarsono, 2005:90), keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target groups*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran

Bahwa tujuan khusus BOS adalah untuk membantu bagi siswa/siswi keluarga miskin atau tidak mampu dimaksudkan agar mereka dapat menikmati layanan pendidikan dasar sembilan tahun dengan berkualitas. Akan tetapi kenyataan dilapangan, oleh sekolah BOS dimanfaatkan untuk subsidi umum untuk membiayai kegiatan operasional sekolah dan semua

murid menerima manfaat. Akibatnya dari jumlah siswa/siswi yang berasal dari keluarga miskin maupun tidak mampu belum seluruhnya dapat memperoleh layanan pendidikan secara memadai.

Ternyata sebagian besar bantuan BOS digunakan untuk membayar tenaga honorer guru/GTT/PTT/Harlep dan urutan kedua adalah untuk pembelian barang dan jasa sedangkan yang ketiga adalah kegiatan belajar mengajar. Sekolah belum sepenuhnya menggunakan dana BOS sesuai dengan juklak karena secara riil dilapangan masih dana BOS yang digunakan seperti Pemberian transportasi siswa miskin belum dilaksanakan, Untuk transportasi lomba guru, Untuk bayar tenaga harlep yang sudah dibiayai PEMDA, Penerimaan Murid masih dikenakan berbagai pungutan dengan berbagai alasan seperti (stopmap Rp.2000,-), Rehab gedung, Pembelian peralatan yang tidak terkait dengan proses pendidikan komputer, Perbaikan Pagar depan sekolah yang seharusnya hal ini tidak boleh terjadi.

Yang dilakukan dengan berbagai kegiatan yang telah disusun berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang disusun oleh sekolah bersama komite sekolah. RAPBS sebagai persyaratan untuk menerima BOS harus mendapat persetujuan Ketua Komite Sekolah, namun hasil kajian tentang pelaksanaan program BOS telah terungkap bahwa, betapa besar dominasi peran Kepala Sekolah dalam penyusunan RAPBS maupun dalam pengelolaan dana BOS hal ini

terjadi hampir seluruh sekolah. Guru dan orang tua wali murid hampir tidak pernah diajak dalam proses penyusunan RAPBS, sedangkan Komite sekolah umumnya hanya ikut menandatangani RAPBS yang telah disusun sekolah. Hal yang demikian inilah menjadikan fungsi kontrol belum dapat berjalan secara efektif. Berdasarkan hasil kajian dari Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BOS dari 72 SMP Negeri hampir sebagian besar dana BOS dimanfaatkan untuk kegiatan, membayar tenaga honorer, GTT, PTT dan Tenaga Harlep, Belanja barang dan jasa, Kegiatan Belajar mengajar, Kegiatan Kesiswaan, Kegiatan Pemeliharaan. Dari komponen tersebut pos yang paling besar adalah (30%) untuk pembayaran tenaga honorer /GTT/ PTT, Tenaga Harlep, (25%) untuk belanja barang jasa dan (20%) untuk kegiatan belajar mengajar, (15%) kegiatan kesiswaan dan (10%) untuk pemeliharaan gedung

Bahwa pencairan dana BOS dilakukan dua tahap dan pencairan dana BOS diterima pada bulan pertama tiap tahapan. Akan tetapi dalam prakteknya pencairan dana BOS sering mengalami keterlambatan atau tidak tepat waktu. Seperti untuk dana BOS tahun 2011 tahap pertama bulan Januari – Juni 2011 baru dapat cair pada triwulan pertama bahkan akhir smester. Sehingga hal ini menjadikan masalah bagi sekolah sebagai pelaksana kegiatan belajar mengajar, padahal kegiatan belajar dituntut harus berjalan akan tetapi disisi lain dana untuk operasional belum tersedia. Persoalan ini yang sering menjadikan pihak sekolah menjadi pusing karena

harus mencarikan dana dengan berbagai upaya agar proses belajar mengajar tetap berjalan lancar.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, untuk pelaksanaan program BOS di kabupaten Sintang sendiri masih menemui beberapa kendala, yaitu masih minimnya partisipasi masyarakat. Partisipasi diartikan sebagai sebuah keikutsertaan masyarakat di dalam sebuah program, dalam hal ini program BOS. Partisipasi masyarakat di dalam program BOS dapat dilihat dari beberapa hal. Khusus untuk kabupaten Sintang, partisipasi dapat dilihat dari tingkat keterlibatan masyarakat dalam setiap proses kebijakan, banyaknya tuntutan yang ditanggapi oleh pemerintah, dan Adanya ruang interaksi dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Menurut hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat sebagai anggota komite sekolah, partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting di dalam akuntabilitas suatu program termasuk program BOS di SMP Negeri. Gambaran partisipasi masyarakat dapat dilihat dari keseriusan masyarakat untuk bertanggungjawab dalam program BOS. Untuk SMP Negeri, tingkat keterlibatan masyarakat dapat diwujudkan melalui keterlibatan yang berupa materi ataupun non-materi. Program BOS di SMP Negeri masih belum mampu menumbuhkan semangat partisipasi. Terlihat dari minimnya keterlibatan masyarakat baik yang berupa materi ataupun non materi.

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam program BOS di kabupaten Sintang juga dapat dilihat dari kuantitas ide yang diberikan masyarakat. Secara sederhana ide masyarakat ini diartikan di dalam proses perumusan Rancangan Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS). Idealnya perumusan RAPBS merupakan kesepakatan antara wali murid dengan sekolah dengan bantuan komite sekolah sebagai pihak yang menengahi proses itu. Materi perumusan RAPBS harus mengikuti aturan yang berlaku. Di dalam proses ini sekolah memaparkan kondisi penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut, dengan disertai laporan pertanggungjawaban periode sebelumnya. Setelah itu baru di susun rumusan tentang RAPBS yang akan diusulkan ke dinas Pendidikan Kabupaten Sintang sebagai pihak yang melegalisasi RAPBS dalam kaitannya dengan penggunaan dana BOS.

Proses perumusan materi RAPBS di dalam kenyataannya masih jauh dari idealnya. Masyarakat hanya berperan sebagai pendengar konsep RAPBS yang sebenarnya sudah jadi. Menurut hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat sebagai anggota komite sekolah di SMP Negeri, ketika ada salah satu wali murid yang bertanya tentang suatu hal yang berkaitan dengan substansi dari RAPBS yang ditawarkan sekolah kepada wali murid, sekolah berargumen bahwa semua itu telah di atur oleh pemerintah pusat.

Bentuk partisipasi masyarakat yang lain dapat di deskripsikan melalui sarana aspirasi yang tersedia. Minimnya partisipasi masyarakat tidak sepenuhnya kesalahan dari masyarakat, namun perlu dikoreksi tentang

sarana atau wadah yang tersedia. Kaitannya dengan program BOS, sarana atau wadah partisipasi masyarakat dapat dituangkan dalam komite sekolah. Komite sekolah secara sederhana merupakan sebuah badan mandiri yang berfungsi mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di tiap-tiap satuan pendidikan atau sekolah.

Menurut hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat sebagai anggota komite sekolah, komite sekolah masih belum bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam sebuah artikel disebutkan bahwa kehadiran komite sekolah hanyalah sebagai bagian formalitas semata, dan pihak orangtua atau wali murid juga tidak mengetahui secara mendalam fungsi dan peran komite sekolah di tiap satuan pendidikan. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa komite sekolah memiliki peran seperti BP3 di masa lampau, yaitu badan yang bertugas sebagai pengumpul dana bantuan untuk pendidikan atau badan justifikasi belaka. Hal ini juga terjadi dalam program BOS khususnya di SMP Negeri. Komite sekolah yang diharapkan mampu mendukung program ini, belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran dari masing-masing pihak tentang tugas dan fungsinya.

b. Sumber Daya

Menurut Edwards III (dalam Subarsono, 2005:90), Sumberdaya dalam implementasi kebijakan dapat berupa sumberdaya manusia, yakni

kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial sehingga implementasi tidak akan berjalan efektif

Akuntabilitas terhadap suatu program, dibutuhkan kemampuan sumberdaya manusia yang handal. Begitu juga di dalam program BOS di SMP Negeri. Akuntabilitas program ini sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM yang dimiliki. Kualitas SDM yang dimaksud adalah latar belakang pendidikan formal dan informal yang ditempuh oleh aparat pelaksana.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang bahwa Program BOS yang melibatkan sekolah dengan jenjang SMP Negeri, keadaan gurunya masih sangat memprihatinkan. Lebih detail bahwa untuk jenjang SMP Negeri yang merupakan salah satu sasaran program BOS, latar belakang pendidikan gurunya masih sangat memprihatinkan. Perlu diingat bahwa, untuk Jenjang SMP Negeri tidak semua SMP Negeri mempunyai tenaga administrasi yang mengurus program BOS, sehingga semua urusan BOS diambil alih oleh guru yang merangkap mengajar kelas. Hal ini tentunya sangat menguras tenaga dan konsentrasi yang akan berdampak pada kualitas mengajar guru. Dampaknya siswa-siswilah yang akan terkena imbasnya. Para siswa akan terlantar materi pelajarannya karena kesibukan guru di dalam mengurus program ini. Akhirnya program ini tidak berjalan sebagai mana mestinya.

Wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri, menyebutkan bahwa adanya program BOS memang secara nyata membantu

keuangan sekolah di dalam operasional sekolah. Namun di sisi lain program ini justru mengakibatkan kegiatan belajar siswa menjadi kacau. Guru tersebut beranggapan bahwa pada bulan-bulan sibuk seperti ketika penyusunan RAPBS, khususnya yang terjadi pada tingkat SD yang tidak terdapat pegawai administrasi, seorang guru harus rela menghabiskan waktu istirahatnya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Pada Tahun 2011 khusus untuk Sekolah Menengah Pertama negeri. Realisasi pencairan dana BOS dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap pertama bulan Januari - Juni 2011 dan tahap kedua bulan Juli -Desember 2011.

Realisasi pencairan BOS untuk tahap pertama adalah pada bulan Januari - Juni 2011. Proses pencairan dana dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Provinsi Kalimantan Barat dengan menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Bank Rakyat Indonesia sebagai rekening penampung yang selanjutnya Bank melakukan penyaluran/pencairan langsung ke- nomor rekening sekolah. Hal ini dikarenakan dasar perolehan dana BOS berdasarkan jumlah anak didik yang ada pada masing-masing sekolah.

Realisasi pencairan dana BOS seluruh SMP Negeri Kabupaten Sintang sebesar Rp.207.267.000,- dana BOS tersebut telah tersalurkan langsung ke nomor rekening sekolah masing-masing. Dari 72 SMP Negeri

penerima dana BOS yang menempati ranking tertinggi adalah SMP Negeri 3 yaitu sebesar Rp. 56.345.000,- dengan jumlah siswa 440 siswa dan urutan kedua adalah SMP Negeri 2 yaitu sebesar Rp 55.696.000,00 dengan jumlah siswa 941 siswa. Mekanisme pencairan dana BOS dengan model semacam ini sangat efektif dan efisien karena uang dapat diterima secara utuh.

Sedangkan realisasi pencairan dana BOS tahap kedua dilakukan pada bulan Juli -Desember 2011 sebesar Rp.110.243.365.000,- (seratus sepuluh milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah). Dari dana bantuan BOS sebesar Rp. 110.243.565.000,- yang disalurkan untuk 72 SMP Negeri di Kabupaten Sintang sebesar Rp. 21.392.320.458,- atas dasar jumlah siswa/siswi 14.385 siswa, dana BOS tersebut telah disalurkan langsung ke-masing-masing sekolah melalui nomor rekening sekolah dengan jumlah yang bervariasi. Hal ini dikarenakan dasar perolehan dana BOS berdasarkan jumlah anak didik yang ada pada masing-masing sekolah.

Realisasi pencairan dana BOS untuk tahap kedua semua SMP Negeri Kabupaten Sintang sebesar Rp. 5.083.918.000,00 dengan jumlah siswa sebanyak 14.385 anak didik dana BOS tersebut telah tersalurkan langsung ke nomor rekening sekolah masing-masing. Model penyaluran langsung ke nomor rekening sekolah lebih efektif dan efisien. Kajian berdasarkan Laporan pertanggung jawaban BOS dari masing-masing SMP Negeri, pada

dasarnya pelaksanaan Program BOS oleh SMP Negeri sudah berjalan efektif, hal ini dapat kita lihat indikator kinerja program yakni sudah terealisasinya pencairan dana BOS dan telah diterima oleh seluruh sekolah dengan utuh sesuai jumlah siswa yang diajukan oleh masing-masing sekolah.

Data tersebut di atas telah terungkap masih adanya kelemahan dalam proses penyaluran dana BOS yang belum dapat berjalan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan bahkan dalam prakteknya terjadi keterlambatan pencairan dana tersebut. Seperti dalam buku panduan BOS telah mengatur bahwa penyaluran dana BOS dilakukan secara bertahap yaitu, dana BOS disalurkan tiap periode 3 (tiga) bulan dan dana BOS disalurkan pada awal bulan dari setiap periode tiga bulan.. Kenyataan dana BOS baru dapat dicairkan menjadi 2 tahap, Jan- Juni tahap pertama dan Juli- desember tahap kedua, yang lebih menjadikan permasalahan pencairan dana BOS tersebut jatuh tempo pada akhir triwulan bahkan terjadi pencairan pada akhir smester. Padahal pihak sekolah untuk menjalankan semua kegiatan operasional sangat tergantung pada dana BOS, kondisi semacam ini menjadikan kacau/pusing pihak sekolah karena dana BOS belum cair di satu sisi kegiatan belajar harus berjalan lebih parah lagi sekolah tidak mempunyai dana cadangan, akibatnya proses belajar mengajar siswa menjadi terganggu.

c. Struktur Birokrasi

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang diketahui bahwa dalam program BOS, pemerintah pusat memberikan dana ke sekolah-sekolah setingkat SD dan SMP yang bersedia memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan peserta program. Sekolah yang dicakup dalam program ini adalah SD/MI/SDLB/Salafiyah setingkat SD dan SMP/MTS/SMPLB/Salafiyah setingkat SMP, baik negeri maupun swasta. Program ini mulai dilaksanakan pada Juli 2005 bersamaan dengan awal tahun ajaran (TA) 2005/2006. Pada prinsipnya program BOS dicetuskan sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat, khususnya siswa dari keluarga miskin atau kurang mampu, terhadap pendidikan yang berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Penekanan tentang prioritas bagi siswa miskin tidak secara eksplisit disebutkan dalam tujuan program di Buku Petunjuk versi 2005, meskipun dalam aturan pelaksanaan program dinyatakan bahwa siswa miskin harus mendapat prioritas lebih besar untuk bebas dari uang iuran sekolah.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang diketahui bahwa Program BOS mengadopsi pendekatan yang berbeda karena dana tidak diberikan secara langsung kepada siswa miskin tetapi diberikan dan dikelola oleh sekolah. Besarnya dana yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa, dengan alokasi sebesar Rp

235.000 per tahun per siswa tingkat SD dan Rp 324.500 per tahun per siswa tingkat SMP. Alokasi per siswa tersebut ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya pendidikan yang diolah dari Susenas 2004. Pada tingkat nasional, dengan adanya perubahan tersebut, jumlah siswa yang dicakup oleh program PKPS-BBM pendidikan tingkat SD dan SMP meningkat hamper lima kali lipat dan anggaran PKPS-BBM bidang pendidikan untuk tingkat SD dan SMP juga meningkat sekitar delapan kali lipat. Besarnya anggaran pendidikan yang dikucurkan pemerintah untuk membantu masyarakat miskin agar bisa mengakses pendidikan dan juga memberikan harapan positif pada pendidikan nasional.

Hasil wawancara dengan Kepala DPPKA Kabupaten Sintang diketahui bahwa Dana BOS diserahkan sekaligus dan ditransfer langsung ke rekening masing-masing sekolah. Pengelolaan dana dilakukan dan menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan guru/bendahara yang ditunjuk, dan pemanfaatannya didasarkan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang telah disetujui oleh Komite Sekolah. Dana BOS harus digunakan untuk membebaskan siswa dari berbagai pungutan di sekolah, tetapi sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Pungutan yang dilakukan di sekolah yang dimaksud meliputi uang formulir pendaftaran, uang SPP, buku pelajaran dan buku penunjang untuk perpustakaan, biaya peningkatan mutu guru, biaya pemeliharaan, ujian sekolah dan ulangan umum/harian, honor guru,

kegiatan kesiswaan (remedial, pengayaan dan ekstrakurikuler) dan member bantuan transportasi bagi siswa miskin. Dana BOS tidak boleh digunakan untuk disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan, dipinjamkan

Sasaran program BOS di Kabupaten Sintang yaitu semua sekolah baik negeri maupun swasta di seluruh kabupaten Sintang untuk jenjang SD dan SLTP. Sedangkan tujuan dari program ini adalah memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa, tetapi sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan di atas, maka jika dikaitkan dengan pendapat Edwards III disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan

Memperhatikan pendapat tersebut, dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, komitmen atau kemauan menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Keberhasilan implementasi program sangat bergantung pada komitmen yang kuat dari seluruh stakeholders untuk melaksanakan kebijakan. Komitmen harus dimiliki oleh birokrasi pelaksana program dan masyarakat yang menjadi target atau sasaran kebijakan. Komitmen yang

kuat dapat menjadi modal bagi terlaksananya kebijakan. Dengan adanya komitmen, berbagai masalah dalam implementasi kebijakan bisa dipecahkan karena setiap pelaksana program berpikir dan bertindak untuk mensukseskan implementasi kebijakan.

Hasil wawancara dengan Kepala SMP Negeri, kegiatan yang dilakukan melalui dana BOS tahun 2012 adalah: Penambahan Ruang Kelas, Pengadaan Meubeluer, Rehabilitasi sedang rumah dinas Kepala Sekolah, Pembangunan Pagar Sekolah, Pembangunan Barau Sekolah, Penyelenggaraan Pengiriman Lomba Keilmuan Siswa, Penyediaan Honor Les Guru, Pengadaan bahan bacaan buku perpustakaan, Penyelenggaraan Pelatihan, seminar, tentang isu Pendidikan.

Berangkat dari sasaran dan tujuan tersebut, penilaian dilakukan agar program ini dapat dikatakan akuntabel. Realita di lapangan menunjukkan bahwa program BOS yang dilaksanakan di SMP Negeri di Kabupaten Sintang secara umum banyak mengalami kekeliruan antara lain berupa jumlah data siswa, alokasi dana BOS yang salah sasaran misalnya penggunaan dana BOS untuk kandungan guru, pembangunan fisik, dan sebagainya.

Indikator keberhasilan pengelolaan Dana BOS Pada Jenjang SMP Negeri di Kabupaten Sintang Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8. Indikator keberhasilan pengelolaan Dana BOS Pada Jenjang SMP Negeri di Kabupaten Sintang Tahun 2012

No	Indikator	Kondisi Sekolah
1	Tepat waktu	program Bantuan Operasional Sekolah belum dapat dicairkan tepat waktu, dimana tiap awal triwulan seharusnya dana BOS sudah harus diterima
2	Tepat guna	Pihak sekolah belum sepenuhnya menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai petunjuk yang telah ditetapkan. Tidak menyimpang dari rambu-rambu, atau bahkan mengada-ada, yang seharusnya tidak diperbolehkan
3	Tepat Sasaran	Sudah tepat sasaran, karena sebelum diterbitkan Surat Keputusan Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terlebih dulu Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota membuat SPPB (Surat Perjanjian Pemberian Bantuan)
4	Tepat Jumlah	Masih adanya perbedaan jumlah bantuan yang diterima dengan jumlah data riil siswa yang ada pada sekolah. Dan jika terjadi kelebihan dana yang diterima, maka harus dikembalikan ke kas negara melalui rekening penampung

Sumber: Data lapangan diolah, 2013.

Adanya kekeliruan ini mengindikasikan telah terjadi pergeseran sasaran dan tujuan program BOS. Adanya pergeseran ini berarti sebuah ketidak-konsistenan aparat pelaksana program BOS di dalam menjalankan program ini. Dampaknya, siswa banyak yang kurang menikmati manfaat program BOS ini. Manfaat yang seharusnya dinikmati siswa, telah diselewengkan oleh aparat baik sengaja ataupun tidak sengaja. Hal inilah yang kemudian menjadikan program BOS menjadi kurang akuntabel. Namun menurut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, kekeliruan yang terjadi hanyalah dilakukan di sebagian kecil sekolah saja, sehingga program ini secara umum masih bisa dikatakan

akuntabel, karena sebagian besar sekolah di Kabupaten Sintang telah melaksanakan program BOS sesuai aturan yang berlaku.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hasil penelitian pelaksanaan program BOS bagi SMP. Negeri Kabupaten Sintang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan program BOS tahun 2011 oleh lembaga sekolah SMP Negeri Kabupaten Sintang Telah dilaksanakan dengan baik artinya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum Buku Panduan BOS. Meskipun demikian hasil penelitian telah mengungkap masih terdapat beberapa kelemahan. Hasil evaluasi ternyata BOS telah terungkap bahwa dana BOS tahun 2011 hampir semua 72 SMP Negeri Kabupaten Sintang Sebesar Rp. 21.392.320.458,- Dari jumlah tersebut ternyata yang paling besar adalah (30%) untuk pembayaran tenaga honorer /GTT/ PTT, Tenaga Harlep, (25%) untuk belanja barang jasa dan (20%). untuk kegiatan belajar mengajar, (15%). kegiatan kesiswaan dan (10%) dan pemeliharaan gedung.
- 2) Cakupan dana BOS bagi Siswa Keluarga Miskin, terdapat jumlah siswa/siswi keluarga miskin berkisar 20 % - 33% dari total siswa. Dari totalitas siswa keluarga miskin baru dapat terlayani sekitar 20% - 25% hal ini disebabkan dana BOS belum dapat menjangkau bagi seluruh siswa miskin.

- 3) Meskipun dana BOS belum cukup untuk seluruh operasional sekolah, akan tetapi sudah sangat membantu kelancaran operasional sekolah, bagaimanapun kenyataan dana BOS memberikan kontribusi sekolah cukup besar jika dibandingkan dengan bantuan APBD yang relatif kecil. Bentuk layanan terhadap siswa miskin masih terbatas pada pemberian bea siswa (khusus) yaitu pembebasan biaya SPP (Rp. 55.000 – Rp. 60.000) dan Sumbangan BP.3 yang besarnya ditentukan oleh komite sekolah.
- 4) Berdasarkan hasil kajian laporan pertanggungjawaban keuangan BOS dari 72 SMP. Negeri di Kabupaten Sintang telah terungkap Penggunaan dana BOS oleh Sekolah belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Pedoman /Penduan BOS antara lain ; pemberian transportasi siswa miskin belum dilaksanakan, untuk transportasi lomba guru, untuk bayar tenaga harlep yang sudah dibiayai Pemkab, Penerimaan Murid Baru masih dikenakan berbagai pungutan, Rehab gedung, Pembelian peralatan yang tidak terkait dengan proses pendidikan komputer dan Perbaikan kecil gedung sekolah. Untuk mengetahui dampak program BOS peneliti melakukan pengumpulan data kuantitatif hasilnya secara umum bahwa BOS dapat memperkuat kemampuan sekolah dalam memberikan materi pembelajaran dan kegiatan tambahan kepada siswa dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

- 5) Kendala atau hambatan dalam pelaksanaan BOS antara lain ;
Pencairan dana BOS sering terlambat atau tidak tepat waktu. Sesuai dengan ketentuan pencairan dana BOS tiap triwulan dan pencairan dapat dicairkan pada awal bulan triwulan, tapi yang terjadi untuk dana BOS tahun 2011. Pencairan dilakukan 2 tahap yaitu tahap pertama bulan Juli – Desember 2011 dan tahap kedua Januari- Juni 2012. Hal ini menjadi masalah bagi sekolah karena akan mengganggu pelaksana kegiatan belajar mengajar, padahal kegiatan belajar dituntut harus berjalan akan tetapi disisi lain dana untuk operasional belum tersedia. Persoalan ini yang sering menjadikan pihak sekolah menjadi pusing karena harus mencari dana dengan berbagai upaya agar proses belajar mengajar tetap berjalan lancar.
- 6) Terdapat kecenderungan oleh Kepala Sekolah dalam penyusunan RAPBS maupun dalam pengelolaan dana BOS hampir orang tua murid tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan RAPBS, sedangkan komite sekolah hanya bersifat formalitas untuk membubuhkan tanda tangan terhadap RAPBS yang telah disusun oleh sekolah sehingga fungsi kontrol masih sangat lemah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka berikut ini akan disampaikan beberapa rekomendasi yang sekiranya dapat dijadikan

bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan pelaksanaan program BOS khususnya dalam rangka mencapai tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program BOS SMP. Negeri di Kabupaten Sintang sebagai berikut :

- 1) Searah dengan tujuan program BOS yaitu dalam rangka pembebasan siswa miskin/tidak mampu. Untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas, hendaknya pemanfaatan dana BOS benarbenar diarahkan untuk operasional sekolah yang menunjang kelancaran proses belajar sesuai dengan buku Panduan BOS yang ditetapkan oleh Pemerintah. Karena komitmen sekolah sebagai penerima sekaligus pengelola BOS sangat menentukan keberhasilan dari pada program BOS baik dalam lingkup internal sekolah maupun daerah.
- 2) Sumber dana sekolah ternyata berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dana BOS dan Sumbangan orang tua siswa. Dari ketiga komponen tersebut ternyata biaya operasional sekolah masih sangat tergantung pada sumbangan orang tua murid maupun BOS sedangkan dukungan APBD masih relatif kecil. Oleh karena itu hendaknya dalam pengelolaan dana dengan melibatkan orang tua (komite) serta hendaknya dilakukan secara transparan melalui laporan pertanggungjawaban publik dengan demikian fungsi control akan dapat berjalan efektif.

- 3) Berdasarkan kajian data siswa yang disusun oleh sekolah. Realisasi RAPBS dan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan BOS seluruh SMP Negeri Kabupaten Sintang telah terungkap terdapat jumlah siswa/siswi keluarga miskin berkisar 20 % - 33% dari total siswa. Dari totalitas siswa keluarga miskin baru dapat terlayani sekitar 20% - 25%. Sedangkan untuk siswa tidak mampu dari total siswa 29.943 siswa masih sekitar 8% atau 2.386 siswa tidak mampu. Dari jumlah tersebut ternyata baru 1365 siswa yang memperoleh layanan pendidikan atau sekitar 57% sedangkan sisanya 1021 anak atau sekitar 43% belum mendapatkan layanan pendidikan dari pihak sekolah. Hal ini disebabkan dana BOS belum dapat menjangkau bagi seluruh siswa miskin. Sedangkan untuk siswa tidak mampu. Oleh karena itu agar penuntasan wajib belajar sembilan tahun dapat berhasil dengan optimal maka hendaknya program BOS terus dilaksanakan dan secara bertahap perlu adanya kucuran dana BOS bagi sekolah dasar secara memadai.
- 4) Agar program BOS secara efektif dapat mendukung kelancaran proses belajar mengajar hendaknya pencairan dana BOS oleh Pemerintah dilakukan secara tepat waktu . Hal ini dimaksudkan agar kebutuhan operasional sekolah tidak mengalami hambatan sehingga kegiatan belajar mengajar akan dapat berjalan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, F. 1997. *Metodologi Penelitian Sosial Dalam Bidang Ilmu Administrasi dan Pemerintahan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Agustino, Leo. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Ashari, ET. (2003). *Upaya Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Di Era Persaingan Bebas*. Jakarta: Forum Inovasi UI.
- BKN RI, 2001. *Manajemen Kinerja SDM*. Jakarta: Badan Kepegawaian Negara.
- Darwin, Muhadjir. 2000. "Akuntabilitas pelayanan publik" *Makalah Seminar Nasional: Profesionalisme Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik*. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL UGM Yogyakarta.
- Depdiknas & Depag, (2006). *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam rangka Wajib Belajar 9 Tahun*. Jakarta: Depdiknas.
- Diamar, S. (2003). *Beberapa Catatan Kunci Dimensi Politik Pelayanan Publik*. Jakarta: Forum Inovasi UI.
- Dunn, WN. (1988). *Analisa Kebijakan Publik*. Penerjemah: Muhadjir Darwin, Yogyakarta: Graha Widya.
- Handoko, TH. 2000. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Islamy, MI. (1998). *Materi Pokok Kebijakan Publik*. Jakarta: Karunia UT
- Isdijoso, W. (2006). *Kajian Cepat PKPS-BBM Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2005*. Malang: Lembaga Penelitian Semeru.
- Jones, C. (1991). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Press
- Loina Lalolo, K. 2003. *Indikator & Alat Ukur, Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mardiasmo. 2001. "Tantangan Akuntansi Sektor Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Dalam Perspektif Otonomi Daerah", *Makalah Seminar Nasional*, 3 Februari 2001, PPSMNFE-UPN "Veteran", Yogyakarta.

- Mustopadidjaja, AR dan Fernanda, Desi. 2001. "*Menegakkan Akuntabilitas Publik untuk Mewujudkan Good Local Governance*". Jurnal Wacana Kinerja. Bandung LAN.
- Mardiasmo. (2002). Otonomi daerah dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Moleong, L.J, (2000) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakrya Bandung
- Pudiklat BPKP. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta.
- Siagian, SP. 1988. *Administrasi Pembangunan; Konsep, Dimensi Dan Strateginya*. Jakarta: CV Haji Mas Agung.
- Sujamto. 1983. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subarsono, A.G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Thamrin. (1997). *Kebijakan Negara Suatu Pengantar*. Pontianak: Fisipol UNTAN.
- Turang, J. (2002). *Pengembangan Kebijakan Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota*. Tomohon: Yayasan Mapalus Matuari Minaesa (YM3).
- Wahab, SA. (1997). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Keimplementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Zulherman (2013). Akuntabilitas implementasi program bantuan operasional sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri Nomor 1 Nanga Ketungau Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang. Sintang: Universitas Kapuas.

Dokumen/Peraturan Perundang – Undangan:

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Nasional tahun 2004-2010
- Recana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2004-2010
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi BOS Tahun Anggaran 2012

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51/2011 Tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS
Tahun Anggaran 2012

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2011
Tentang Pedoman Pengelolaan BOS

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 1**PEDOMAN WAWANCARA**

Judul : **IMPELEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM PELAYANAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG**

Nama : **SAMSUAR**

NIM : **015977579**

A. Ketepatan Sasaran

1. Apa saja jenis-jenis pemanfaatan program BOS pada jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Sintang?
2. Apa pertimbangan sehingga dipilihnya jenis-jenis pemanfaatan program BOS pada jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Sintang?
3. Apa jenis-jenis pemanfaatan program BOS pada jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Sintang telah sesuai dengan Juknis dari program BOS?
4. Bagaimana mekanisme penentuan jenis-jenis pemanfaatan program BOS pada jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Sintang?
5. Kendala apa yang sering dihadapi sekolah dalam penentuan jenis-jenis pemanfaatan program BOS pada jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Sintang?
6. Bagaimana pelaksanaan atau implementasi pemanfaatan program BOS pada jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Sintang?
7. Bagaimana kesesuaian antara implementasi pemanfaatan program BOS dengan tujuan dan saran program BOS pada jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Sintang?
8. Perubahan apa yang terjadi (kemajuan atau kemunduran) setelah program BOS dilaksanakan pada jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Sintang?
9. Dampak konkret apa yang menonjol pasca program BOS dilaksanakan pada jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Sintang ini berjalan?
10. Kekurangan apa saja yang ditemui di dalam program BOS dilaksanakan pada jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Sintang yang nantinya sebagai masukan di dalam pelaksanaan program tahap selanjutnya?

B. Penerapan Skala Prioritas Dalam Penggunaan Dana

1. Apakah penggunaan dana pada jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Sintang sudah mengikuti petunjuk pelaksanaan (juklak) BOS yang ada?.
2. Bagaimana proses identifikasi kebutuhan sekolah dalam implementasi program BOS pada jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Sintang?
3. Bagaimana proses pemilihan alternatif penggunaan dana dalam implementasi program BOS pada jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Sintang?
4. Bagaimana peran kepala sekolah di dalam pemilihan alternatif penggunaan dana dalam implementasi program BOS pada jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Sintang?
5. Apakah di dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Sekolah (RAPBS), sekolah telah melakukan penghematan?
6. Apa bentuk konkret dari penghematan itu?
7. Penghematan biasanya akan mempengaruhi kualitasnya. Apakah hal ini berlaku pada program dalam implementasi program BOS pada jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Sintang?
8. Apakah penghematan ini didukung oleh masyarakat? Dukungan seperti apa yang diberikan masyarakat?

C. Sistem Pengawasan

1. Apakah ada lembaga baik internal maupun eksternal yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan implementasi program BOS pada jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Sintang?
2. Bagaimana kualitas pengawasan yang dilakukan oleh lembaga tersebut?
3. Apakah ada Media (cetak dan elektronik) melaksanakan fungsi pengawasan implementasi program BOS pada jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Sintang?
4. Bagaimana kualitas pengawasan yang dilakukan oleh Media tersebut?
5. Bagaimana peran masyarakat melaksanakan fungsi pengawasan implementasi program BOS pada jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Sintang?
6. Bagaimana kualitas pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat?

tersebut?

7. Apakah ada penyimpangan yang terjadi yang terkait dengan pelaksanaan petunjuk pelaksanaan (juklak) BOS pada jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Sintang?
8. Saran atau rekomendasi apa yang pernah diberikan oleh lembaga/media/masyarakat dalam usahanya menyukseskan implementasi program BOS pada jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Sintang?

D. Tingkat Partisipasi Masyarakat

1. Dalam bentuk apa sajakah biasanya masyarakat merasa dilibatkan dalam program BOS pada jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Sintang?
2. Berapa banyak ide-ide atau pemikiran yang diberikan masyarakat terkait dengan program BOS pada jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Sintang?
3. Biasanya ide-ide tersebut menyangkut hal apa?
4. Berapa banyak keterlibatan yang berupa materi yang diberikan masyarakat dalam implementasi BOS pada jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Sintang?
5. Tuntutan apa yang biasanya masuk ke sekolah yang berasal dari masyarakat terkait program BOS pada jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Sintang?
6. Bagaimana respon dari sekolah terhadap tuntutan yang ada?
7. Adanya ruang interaksi dan komunikasi antara sekolah dengan masyarakat dalam implementasi BOS pada jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Sintang?
8. Bagaimana cara sekolah dalam merangsang bentuk partisipasi masyarakat, sehingga program BOS pada jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Sintang dapat dikatakan akuntabel?
9. Forum apa yang biasa digunakan sebagai media partisipasi masyarakat dalam BOS pada jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Sintang?
10. Apakah forum yang tersedia sebagai representasi partisipasi masyarakat sudah cukup memberikan hasil yang diharapkan?

E. Kemampuan Sumber Daya Manusia

1. Bagaimana pemahaman kepala sekolah tentang petunjuk pelaksanaan BOS pada jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Sintang?

2. Bagaimana pemahaman bendahara sekolah tentang petunjuk pelaksanaan BOS pada jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Sintang?
3. Bagaimana pemahaman pelaksana teknis sekolah tentang petunjuk pelaksanaan BOS pada jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Sintang?
4. Bagaimana komitmen Kepala Sekolah, Bendahara Dan Pelaksana dalam menyukseskan implementasi pelaksanaan BOS pada jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Sintang?
5. Bagaimana keterampilan aparat pelaksana dalam implementasi program BOS pada jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Sintang?
6. Apakah pernah terjadi kesalahan administratif dan kesaahan teknis yang dilakukan aparat pelaksana dalam implementasi program BOS pada jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Sintang?
7. Jika pernah, apa saja kesalahan tersebut serta apa upaya memperbaikinya?

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 2

PEDOMAN OBSERVASI

Judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM PELAYANAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG

Nama : SAMSUAR

NIM : 015977579

1. Kondisi Sekolah

No	Indikator	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1	Struktur Organisasi Sekolah		
2	Pembagian Tugas Dan Tanggung Jawab Masing-Masing Personil di Sekolah (<i>Job Discription</i>)		
3	Rencana Anggaran Pendapatan Sekolah (RAPBS),		
4	Alokasi Dana Bos		

2. Akuntabilitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Jenjang Pendidikan SMP di Kabupaten Sintang

No	Fokus Observasi	Keterangan		Keterangan
		Ada/baik	Tidak ada/tidak baik	
I	Akuntabilitas Implementasi Program BOS			
1.	jenis-jenis pemanfaatan program BOS			
2.	Dokumen administratif implmentasi program BOS			
3.	Dokumen teknis implmentasi program BOS			
4.	Dokumen perencanaan pemanfaatan program BOS			
5.	Dokumen pelaporan implmentasi program BOS			
6.	Dokumen monitoring dan evaluasi program BOS			
7.	Hasil implementasi program BOS			
8.	Berbagai kendala implementasi program BOS			
II	Faktor Menentukan Akutabilitas Program BOS			
1.	Partisipasi masyarakat dalam Program Bos			
2.	Media Pengawasan			
3.	Lembaga pengawasan			
4.	Hasil pengawasan dan rekomendasi dari pihak lain			

Lampiran 3

Jumlah Siswa Miskin SMP. Negeri Kabupaten Sintang Yang Terlayani Dana BOS Tahun 2011/2012

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH SISWA	JUMLAH SISWA MISKIN	JUMLAH SISWA MISKIN DAN TOTAL SISWA YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KHUSUS	JML SISWA MISKIN YANG TERLAYANI(%)
1	SMP N 1 Ketungau Hulu	383	237	237	86,18
2	SMP N 2 Ketungau Hulu	146	122	162	85,26
3	SMP N 3 Ketungau Hulu	123	113	248	90,18
4	SMP N 4 Ketungau Hulu	67	37	200	75,00
5	SMP N 5 Ketungau Hulu	61	41	10	80,00
6	SMP N 1 Serawai	566	426	35	70,00
7	SMP N 2 Serawai	24	15	156	78,00
8	SMP N 3 Serawai	130	110	50	80,00
9	SMP N 1 Ketungau Tengah	451	330	36	67,00
10	SMP N 2 Ketungau Tengah	105	55	10	50,00
11	SMP N 3 Ketungau Tengah	194	154	45	75,00
12	SMP N 4 Ketungau Tengah	82	32	22	66,00
13	SMP N 1 Sintang	749	654	25	57,00
14	SMP N 2 Sintang	941	851	100	100,00
15	SMP N 3 Sintang	440	380	100	80,00
16	SMP N 4 Sintang	420	15	15	64,00
17	SMP N 1 Sepauk	414	300	50	100,00
18	SMP N 2 Sepauk	227	187	50	66,00
19	SMP N 3 Sepauk	179	159	200	72,00
20	SMP N 4 Sepauk	151	50	150	100,00
21	SMP N 5 Sepauk	157	60	100	100,00
22	SMP N 6 Sepauk	146	90	100	66,00
23	SMP N 7 Sepauk	91	15	100	66,00
24	SMP N 8 Sepauk	135	50	50	50,00
25	SMP N 1 Tempunak	178	10	10	80,00
26	SMP N 2 Tempunak	255	43	43	66,00
27	SMP N 3 Tempunak	176	150	150	67,00
28	SMP N 4 Tempunak	192	15	13	43,00
29	SMP N 5 Tempunak	111	50	50	84,00
30	SMP N 6 Tempunak	92	10	200	66,00
31	SMP N 7 Tempunak	133	100	100	80,00
32	SMP N 1 Dedai	171	100	100	79,00
33	SMP N 2 Dedai	448	100	100	80,00
34	SMP N 3 Dedai	276	45	45	80,00
35	SMP N 4 Dedai	224	20	20	100,00
36	SMP N 5 Dedai	125	40	40	100,00
37	SMP N 6 Dedai	92	10	100	50,00

38	SMP N 1 Kelam Permai	172	40	40	100,00
39	SMP N 2 Kelam Permai	405	67	67	89,00
40	SMP N 3 Kelam Permai	140	50	50	100,00
41	SMP N 1 Kayan Hilir	560	25	25	100,00
42	SMP N 2 Kayan Hilir	97	5	5	50,00
43	SMP N 3 Kayan Hilir	39	30	30	55,00
44	SMP N 4 Kayan Hilir	76	60	90	90,00
45	SMP N 6 Kayan Hilir	60	50	50	25,00
46	SMP N 1 Kayan Hulu	467	75	75	85,00
47	SMP N 2 Kayan Hulu	65	50	50	50,00
48	SMP N 3 Kayan Hulu	64	50	20	90,00
49	SMP N 4 Kayan Hulu	49	10	10	15,00
50	SMP N 5 Kayan Hulu	69	50	80	80,00
51	SMP N 1 Ambalau	349	25	25	45,00
52	SMP N 2 Ambalau	122	10	10	95,00
53	SMP N 3 Ambalau	64	3	3	90,00
54	SMP N 1 Sungai Tebelian	500	80	80	80,00
55	SMP N 2 Sungai Tebelian	178	20	20	75,00
56	SMP N 3 Sungai Tebelian	192	100	10	80,00
57	SMP N 4 Sungai Tebelian	93	80	11	50,00
58	SMP N 5 Sungai Tebelian	100	10	10	65,00
59	SMP N 5 Satu Atap Sintang	47	15	15	45,00
60	SMP N 6 Satu Atap Sintang	151	2	2	40,00
61	SMP N 1 Binjai Hulu	335	75	75	75,00
62	SMP N 2 Satu Atap Binjai Hulu	79	10	10	25,00
63	SMP N 6 Satu Atap Ket. Hulu	43	15	15	50,00
64	SMP N 4 Satu Atap Kelam Permai	95	6	6	100,00
65	SMP N 5 Satu Atap Kelam Permai	30	20	40	100,00
66	SMP N 5 Satu Atap Kayan Hilir	67	45	125	55,00
67	SMP N 7 Satu Atap Kayan Hilir	37	8	8	80,00
68	SMP N 4 Satu Atap Serawai	23	15	55	100,00
69	SMP N 1 Ketungau Hilir	127	5	5	100,00
70	SMP N 2 Ketungau Hilir	362	75	75	65,00
71	SMP N 3 Ketungau Hilir	128	75	75	100,00
72	SMP N 4 Ketungau Hilir	128	40	40	100,00
Jumlah			14.413	6.472	75,00

Sumber : data siswa dan realisasi APBS,2011/2012

Lampiran 4

Realisasi Dan Sumber Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Sekolah (APBS) SMP Negeri Kabupaten Sintang
Tahun 2011/2012

SUMBER DANA			
NO	SEKOLAH	BOS	JUMLAH
1	SMP N 1 Ketungau Hulu	367,098,000	367,098,000
2	SMP N 2 Ketungau Hulu	340,548,000	340,548,000
3	SMP N 3 Ketungau Hulu	370,992,000	370,992,000
4	SMP N 4 Ketungau Hulu	328,512,000	328,512,000
5	SMP N 5 Ketungau Hulu	310,000,000	310,000,000
6	SMP N 1 Serawai	337,362,000	337,362,000
7	SMP N 2 Serawai	338,778,000	338,778,000
8	SMP N 3 Serawai	267,624,000	267,624,000
9	SMP N 1 Ketungau Tengah	286,740,000	286,740,000
10	SMP N 2 Ketungau Tengah	333,822,000	333,822,000
11	SMP N 3 Ketungau Tengah	249,216,000	249,216,000
12	SMP N 4 Ketungau Tengah	345,000,000	345,000,000
13	SMP N 1 Sintang	266,562,000	266,562,000
14	SMP N 2 Sintang	270,810,000	270,810,000
15	SMP N 3 Sintang	297,360,000	297,360,000
16	SMP N 4 Sintang	334,176,000	334,176,000
17	SMP N 1 Sepauk	338,070,000	338,070,000
18	SMP N 2 Sepauk	274,350,000	274,350,000
19	SMP N 3 Sepauk	243,906,000	243,906,000
20	SMP N 4 Sepauk	323,556,000	323,556,000
21	SMP N 5 Sepauk	334,530,000	334,530,000
22	SMP N 6 Sepauk	312,000,000	312,000,000
23	SMP N 7 Sepauk	276,000,000	276,000,000
24	SMP N 8 Sepauk	312,000,000	312,000,000
25	SMP N 1 Tempunak	280,368,000	280,368,000
26	SMP N 2 Tempunak	335,946,000	335,946,000
27	SMP N 3 Tempunak	281,430,000	281,430,000
28	SMP N 4 Tempunak	284,970,000	284,970,000
29	SMP N 5 Tempunak	245,676,000	245,676,000
30	SMP N 6 Tempunak	317,000,000	317,000,000
31	SMP N 7 Tempunak	298,000,000	298,000,000
32	SMP N 1 Dedai	245,676,000	245,676,000
33	SMP N 2 Dedai	264,438,000	264,438,000
34	SMP N 3 Dedai	302,316,000	302,316,000
35	SMP N 4 Dedai	277,890,000	277,890,000
36	SMP N 5 Dedai	328,512,000	328,512,000
37	SMP N 6 Dedai	287,600,000	287,600,000

38	SMP N 1 Kelam Permai	328,512,000	328,512,000
39	SMP N 2 Kelam Permai	234,348,000	234,348,000
40	SMP N 3 Kelam Permai	260,544,000	260,544,000
41	SMP N 1 Kayan Hilir	281,430,000	281,430,000
42	SMP N 2 Kayan Hilir	317,538,000	317,538,000
43	SMP N 3 Kayan Hilir	376,500,000	376,500,000
44	SMP N 4 Kayan Hilir	234,000,000	234,000,000
45	SMP N 6 Kayan Hilir	255,000,000	255,000,000
46	SMP N 1 Kayan Hulu	53,808,000	53,808,000
47	SMP N 2 Kayan Hulu	312,936,000	312,936,000
48	SMP N 3 Kayan Hulu	279,306,000	279,306,000
49	SMP N 4 Kayan Hulu	208,000,600	208,000,600
50	SMP N 5 Kayan Hulu	167,000,000	167,000,000
51	SMP N 1 Ambalau	345,000,000	345,000,000
52	SMP N 2 Ambalau	381,258,000	381,258,000
53	SMP N 3 Ambalau	256,000,000	256,000,000
54	SMP N 1 Sungai Tebelian	252,756,000	252,756,000
55	SMP N 2 Sungai Tebelian	105,846,000	105,846,000
56	SMP N 3 Sungai Tebelian	290,700,000	290,700,000
57	SMP N 4 Sungai Tebelian	257,000,600	257,000,600
58	SMP N 5 Sungai Tebelian	480,480,000	480,480,000
59	SMP N 5 Satu Atap Sintang	370,920,000	370,920,000
60	SMP N 6 Satu Atap Sintang	419,760,000	419,760,000
61	SMP N 1 Binjai Hulu	458,700,000	458,700,000
62	SMP N 2 Satu Atap Binjai Hulu	526,020,000	526,020,000
63	SMP N 6 Satu Atap Ket. Hulu	325,000,000	325,000,000
64	SMP N 4 Satu Atap Kelam Permai	231,000,000	231,000,000
65	SMP N 5 Satu Atap Kelam Permai	324,000,000	324,000,000
66	SMP N 5 Satu Atap Kayan Hilir	365,000,000	365,000,000
67	SMP N 7 Satu Atap Kayan Hilir	356,000,000	356,000,000
68	SMP N 4 Satu Atap Serawai	265,000,000	265,000,000
69	SMP N 1 Ketungau Hilir	325,000,000	325,000,000
70	SMP N 2 Ketungau Hilir	231,000,000	231,000,000
71	SMP N 3 Ketungau Hilir	324,000,000	324,000,000
72	SMP N 4 Ketungau Hilir	365,000,000	365,000,000
JUMLAH		21,392,320,458	21,392,320,458

Sumber : diolah dari APBS SMP.N, 2011/2012 Kabupaten Sintang

BIODATA PENULIS

N a m a : SAMSUAR, S.Mn
Tempat/Tanggal Lahir : Nanga Tebidah, 5 Mei 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (pada Dinas Pendidikan Kab.Sintang)
Pendidikan : 1. SDN No. 1 Sintang Kab. Sintang
 2. SMPS Panca Setya Sintang Kab. Sintang
 3. SMA Negeri 1 Sintang Kab. Sintang
 4. S1 Universitas Terbuka Jurusan Ekonomi
 Manajemen
Alamat : Rumah
 Jalan YC. Oevang Oeray Komplek BTN Griya
 Palapa Permai Blok B No. 3 Kab. Sintang
 Kalimantan Barat.
 Kantor
 Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang
 Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo
 Kab. Sintang Kalimantan Barat
Nama suami : Andi Kasih Setiawan, S.Sos
Nama anak : 1. Andi Rhadisya Putra Julivairza
 2. Andi Rhavirza Putra Juniandra
Nama orang tua : Bapak (Alm) Adja Romban
 Ibu Ranggai